



**DINAS KOPERASI, UKM
PROVINSI SUMATERA BARAT**



LAPORAN KINERJA

Tahun 2019

Jl. Khatib Sulaiman No. 11 Padang
Telp. (0751) 44320 - 7055298 - 7055292 Fax. (0751) 7052701
Email : diskop@sumbarprov.go.id
Website : diskopukm.sumbarprov.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi melalui tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan yakni; perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga dalam pembangunan Koperasi dan UKM dilaksanakan melalui pendekatan keberpihakan (*affirmative*) dan pendekatan pengembangan kemandirian.

Pendekatan keberpihakan diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan berusaha, dukungan peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan, serta perlindungan usaha terutama bagi Koperasi dan UKM yang berkembang di antara masyarakat berpenghasilan rendah. Pada saat yang sama, pembangunan Koperasi dan UKM diarahkan untuk membangun kemandirian dan daya saing melalui penciptaan iklim yang kondusif, penerapan IPTEK dan penguatan skala ekonomi sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menghadapi kondisi pasar yang dinamis. Selanjutnya pembangunan Koperasi dan UKM juga diarahkan untuk memperkuat peningkatan kontribusinya dalam perekonomian, baik dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja maupun dalam peningkatan nilai tambah perekonomian yang menyokong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kehadiran lebih dari 4000 Koperasi dan 593.100 UMKM di Sumatera Barat, telah mampu menyerap banyak tenaga kerja, dan menjadi dominasi kegiatan perekonomian masyarakat karena pelaku Koperasi dan UMKM menyebar hingga ke pelosok pedesaan. Sebagian besar berorientasi pasar dalam negeri, antara lain produk makanan ringan, barang-barang kerajinan, konveksi, sulaman , perbengkelan. Sebagian nya ikut berperan aktif untuk memajukan pariwisata.

Namun kontribusi Koperasi dan UKM seakan akan belum memberikan sumbangan yang berarti, karena gerakan Koperasi dan UKM jarang dipublikasikan.

Kedepannya peningkatan daya saing Koperasi dan UKM mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar melalui langkah strategi : Peningkatan kualitas SDM, Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, penguatan kelembagaan, peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah dengan maksud :

- a) Mengukur tingkat pencapaian/keberhasilan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2019
- b) Mengevaluasi kinerja instansi pemerintah
- c) Untuk bahan penyusunan perencanaan tahun berikutnya

Selain itu Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun dengan tujuan:

- a) Mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak terkait
- b) Mewujudkan perubahan-perubahan kearah perbaikan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.

1.3. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128) , yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro

Kecil dan Menengah, dalam menyelenggarakan tugas tersebut, mempunyai fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor : 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi , sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 3) Pembinaan dan fasilitasi bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 4) Pelaksanaan kesekretariatan dinas
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinansan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Sekretariat dan Bidang pada Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat adalah :

- 1) **Sekretariat**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- (a) penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas
- (b) penyelenggaraan pembinaan dan penatan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas
- (c) Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

- 2) **Bidang Perizinan dan Kelembagaan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang perizinan, kelembagaan, monitoring, evaluasi pelaporan dan data koperasi
- 3) Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

- (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
- (b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang kelembagaan
- (c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi

- 4) **Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pengawasn, pemeriksaan kelembagaan dan usaha simpan pinjam koperasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :

- (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian
- (b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan
- (c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan peraturan dan sanksi

- 5) **Bidang Pemberdayaan Koperasi**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pemberdayaan koperasi, fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas sdm koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

- (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi usaha koperasi

- (b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas sdm koperasi
- (c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi

6) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pemberdayaan usaha kecil, fasilitasi usaha kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil, peningkatan kualitas kewirausahaan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi usaha kecil
- (b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporandi bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil
- (c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas kewirausahaan

7) UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pendidikan dan latihan koperasi, Untuk menyelenggarakan tugas pokok UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- (a) penyusunan rencana pembangunan teknsi operasional pendidikan dan latihan koperasi
- (b) pengkajian dan analisa teknis operasional pendidikan dan latihan koperasi

- (c) pengujian dan persiapan teknologi pendidikan dan latihan koperasi dilapangan
- (d) pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan dan latihan koperasi
- (e) pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang pendidikan dan latihan koperasi
- (f) pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang pendidikan dan latihan koperasi
- (g) pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam pengembangan Koperasi dan UKM yang nantinya akan berdampak kepada peningkatan pendapatan masyarakat. Adapun peran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kualitas usaha koperasi
2. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UKM dalam menghadapi era ekonomi global
3. Meningkatkan usaha koperasi sektor riil dan usaha simpan pinjam koperasi sehingga berdampak pada peningkatan anggota koperasi
4. Meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing UMKM
5. Mengembangkan produk unggulan daerah yang dikelola koperasi

Peran strategis Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, dinyatakan bahwa perkembangan indikator urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dimana untuk persentase koperasi aktif selalu mengalami peningkatan yang berindikasi kepada adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap gerakan koperasi dalam bentuk bertambahnya jumlah

anggota, modal serta Sisa Hasil Usa (SHU) sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, struktur organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, yang membawahi :

- a. Sub. Bagian Tata Usaha
- b. Sub. Bagian Keuangan
- c. Sub. Bagian Program

3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan, yang membawahi :

- a. Seksi Perizinan
- b. Seksi Kelembagaan
- c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

4. Bidang Peengawasan dan Pemeriksaan, yang membawahi :

- a. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi
- b. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
- c. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.

5. Bidang Pemberdayan Koperasi, yang membawahi:

- a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi
- b. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
- c. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi

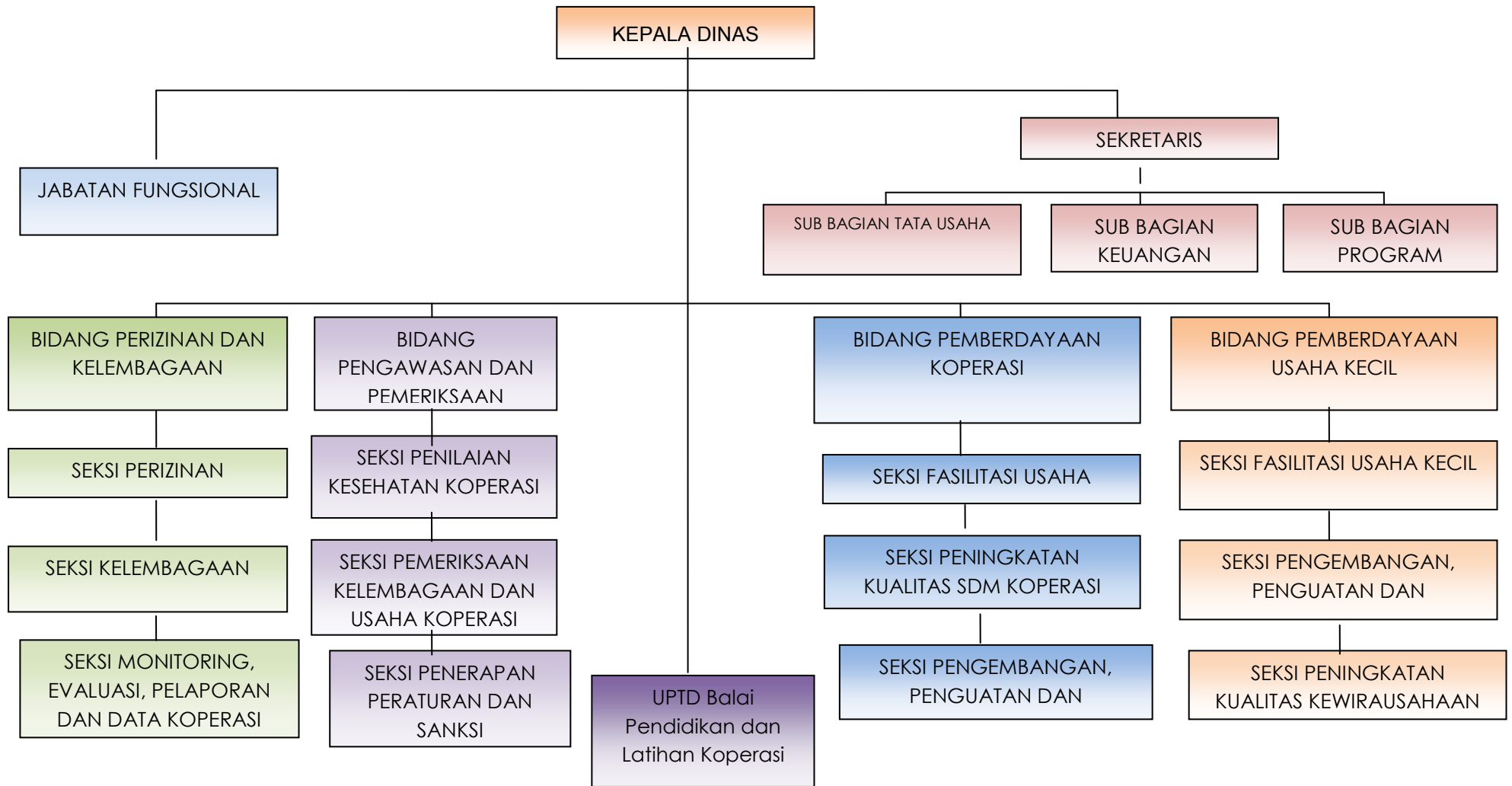
6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, yang membawahi:

- a. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil
- b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil
- c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 061/8953/SJ perihal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 98 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 Desember 2017, maka struktur organisasi UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi (BALATKOP) Propinsi Sumatera Barat, terdiri atas :

- a. Kepala UPTD
- b. Kasubag Tata Usaha
- c. Kasi Pelaksanaan Program dan Pengembangan
- d. Kasi Penyelenggaraan Diklat

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOPERASI UKM PROVINSI SUMATERA BARAT
 (Perda Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Sumatera Barat)



1.6. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat didukung oleh pegawai sebanyak 65 orang dengan kualifikasi yang tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 1.
Kualifikasi Pendidikan Pegawai

	Pendidikan							JML
	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	
PNS	0	0	17	4	28	16	-	65
Non PNS								
JUMLAH ORANG	0	0	17	4	28	16	-	65

Tabel 2.
Kualifikasi Pangkat dan golongan

JENIS KEPEGAWAIAN	GOL. I	GOL. II	GOL.III	GOL.IV	JUMLAH
PNS	0	7	43	15	65
PTT/HONOR	-	-	-	-	
JUMLAH ORANG	0	7	43	15	65

1.7. PERMASALAH STRATEGIS ORGANISASI

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UKM disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu (1) masih banyaknya koperasi yang kelengkapan legalitasnya belum lengkap; (2) masih adanya koperasi yang belum menjalankan organisasi koperasi secara baik sesuai peraturan Perundang-Undangan; (3) stigma koperasi ditengah masyarakat masih dianggap sebagai organisasi yang jadul sehingga perlu

dilakukan perubahan menjadi organisasi yang modern; (4) Peran KSP/KSPPS/USP/USPPS koperasi dalam akses pembiayaan UMKM ekonomi produktif yang perlu ditingkatkan; (5) Sinergi dengan berbagai pihak dalam pengembangan usaha sector riil koperasi; (6) Masih rendahnya kemampuan pelaku UMKM dalam penguasaan IT untuk pengembangan pemasaran secara online; (7) Masih ada sebagian pelaku UMKM yang belum paham tentang Program Skim kredit perbankan dan Non bank.

Faktor internal yaitu (1) Masih rendahnya penerapan teknologi informasi dalam memberikan layanan transaksi anggota dan laporan keuangan; (2) Akses permodalan koperasi kelembaga perbankan/non bank, lembaga dana bergulir serta dunia usaha; (3) Kompetensi SDM pengurus/pengelola koperasi yang masih perlu ditingkatkan; (4) Seringnya terjadi mutasi ASN pada lingkup Kabupaten/Kota.

Dari uraian diatas maka perlu dilakukan solusi dalam dalam pengembangan Koperasi dan UKM meliputi, antara lain :

1. **Masih rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi.** Akhir-akhir ini beberapa Koperasi belum menjalankan tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*). Hal ini disebabkan bahwa pendirian koperasi belum didasari atas kepentingan dan kesamaan ekonomi yang sama diantara anggota. Untuk meningkatkan kelembagaan koperasi ini perlu dilakukan pendampingan, bimbingan teknis serta pengawasan dalam pengelolaan kelembagaan koperasi.
2. **Masih rendahnya kinerja Koperasi.** Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi manajemen Koperasi akan menyebabkan kurang optimalnya kinerja Koperasi. Kinerja koperasi yang kurang baik ini disebabkan karena terbatasnya SDM pengurus/pengelola koperasi. Dalam rangka peningkatan SDM pengurus/pengelola koperasi perlu kiranya dilakukan pembinaan maupun pendampingan baik dalam bentuk Rakor, Bimtek dan Pelatihan. Disamping itu dengan terbatasnya jumlah ASN sebagai pembina koperasi, Kepala Daerah perlu mempertimbangkan kembali mutasi yang sering terjadi di Kabupaten/Kota.

3. **Masih terbatasnya penerapan IT dalam pengembangan Usaha dan pemasaran.** Untuk perkembangan usaha yang baik, Koperasi harus bisa menerapkan IT dalam kegiatan usahanya. Koperasi harus menyesuaikan perkembangan IT sehingga perkembangan usaha koperasi akan lebih baik dimasa depan. Begitu juga halnya kengan UMKM, dimana pada saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan UMKM dalam pemasaran produknya. Produk akan berkembang cepat apabila UMKM dapat memasarkan produknya dengan baik.

1.8. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, aspek strategis organisasi, struktur organisasi, Sumber daya madunia, permasalahan strategis organisasi Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019, menjelaskan metodologi pengukuran capaian kinerja, hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja organisasi , dan realisasi anggaran.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 ditujukan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, telah ditetapkan kerangka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Madani** adalah suatu masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, dan moral yang ditopang oleh keimanan.
2. **Sejahtera** adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi dan hiburan, terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan 2016-2021. Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah *“adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”*;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;

4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan visi, misi, dan agenda tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM, dan peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Dari sepuluh prioritas di atas yang sangat terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah **prioritas 6 yaitu Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM, dan peningkatan investasi.**

2.2 RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

Rencana Kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana telah diubah dengan Revisi Rencana Strategis Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Barat 2016-

2021 melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor: 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang memuat, visi, misi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Secara ringkas, Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 diuraikan sebagai berikut:

2.2.1. TUJUAN DAN SASARAN

2.2.1.1. TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat menetapkan satu tujuan berdasarkan rekomendasi Tim Penguatan SAKIP melalui Surat Keputusan Gubernur yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu 2016-2021 yaitu:

No	Tujuan Organisasi Awal	Tujuan Organisasi Setelah Evaluasi Kementerian PAN-RB	Tujuan Organisasi sesuai rekomendasi tim penguatan SAKIP November 2018
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UKM	Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui peran koperasi dan UKM
2	Dinas Koperasi yang berkinerja baik	Meningkatnya kinerja organisasi	Meningkatnya kinerja organisasi

2.2.1.2 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan tujuan tersebut, selanjutnya Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Revisi Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 serta Perubahan RPJMD Sumatera Barat 2016-2021, sebagaimana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET					
				1	2	3	4	5	6
Sebelum Perubahan									
1	Meningkatnya daya saing dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah	Meningkatnya nilai aset koperasi	%	8	8,5	8,75	9	9,5	10
		Meningkatnyanilai omset koperasi	%	7	7,5	8,25	8,75	9,5	10
		Meningkatnya skala usaha UKM Binaan	%	1,2	1,2	1,7	2,2	2,6	3,1
2	Meningkatnya kapasitas organisasi Dinas Koperasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Kategori	B	B	BB	BB	BB	BB
		Capaian realisasi fisik pengelolaan program/kegiatan	%	100	100	100	100	100	100
		Capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan	%	95	95	96	96	96	96
Setelah Perubahan									
1	Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM	Persentase peningkatan nilai aset koperasi	%	-	8,5	9	9,5	10	10,5
		Persentase peningkatan nilai omset koperasi	%	-	7,5	8	8,5	9	9,5
		Persentase koperasi aktif	%	-	-	77,5	78	78,5	79
		Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	bh	-	-	40	40	40	40
2	Meningkatnya kinerja organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Kategori	B	B	BB	BB	BB	BB
		Capaian realisasi fisik dan keuangan pengelolaan program/kegiatan	%			96	96	96	96

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

2.2.2. CARA MENCAPAI SASARAN

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan pembangunan kehutanan yang dikerjakan secara bertahap per tahun. Mengingat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari kebijakan Pembangunan Kehutanan Nasional melalui Kebijakan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan Kebijakan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Langkah-langkah Strategis Pencapaian Sasaran

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM	Peningkatan penyuluhan, pendampingan, diklat serta pengawasan	Meningkatkan tata kelola koperasi yang sesuai jati diri koperasi Meningkatkan produktifitas, manajemen usaha, permodalan, pembiayaan anggota dan SDM pengelola dan pembina koperasi	1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembenahan Koperasi Tidak Aktif • Pembinaan Kelembagaan Koperasi • Pembinaan Pengawasan dan Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi • Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi • Sosialisasi Peningkatan Peran Koperasi Dalam Pengembangan Kelompok Usaha Strategis • Pembinaan Peningkatan daya saing Koperasi/KUD sektor Pertanian • Revitalisasi Usaha Koperasi Pertanian • Peningkatan Usaha Rital Koperasi • Peningkatan peranan koperasi sektor aneka usaha • Peningkatan dan evaluasi permodalan koperasi

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
		Meningkatkan kompetensi manajerial, standarisasi dan perkuatan produk, akses pembiayaan dan pemasaran produk UKM	3. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan pengawasan dan pemeriksaan usaha simpan pinjam koperasi • Perkuatan produk UMKM • Peningkatan Gerakan Terpadu Pensejahteraan UMKM Sumatera Barat • Partisipasi Promosi produk UMKM • Sosialisasi dan koordinasi pendaftaran merk dan sertifikasi halal • Temu mitra UMKM • Peningkatan akses pembiayaan UMKM ke perbankan dan lembaga non bank
Meningkatnya tata kelola organisasi	Percepatan Proses SPJ, Pelaporan dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Internal Dinas Kehutanan	Peningkatan Kinerja Dinas Koperasi, UKM pada Setiap Bidang dan Perencanaan Setiap Kegiatan yang Lebih Baik	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Surat-Menyurat • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah • Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor • Penyediaan Alat Tulis Kantor • Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor • Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan • Penyediaan Makanan dan Minuman • Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah • Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
			2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<p>dan Publikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur • Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD • Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional • Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan perlengkapan kantor • Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor • Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan • Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Pengadaan Meubelair • Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional • Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya • Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
			3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Penatausahaan Keuangan SKPD • Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
			5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan

Sumber: Revisi Rencana Strategis Perubahan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang efektif, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan mempedomani Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 065-1038-2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera barat No. 065-832-2018 tentang Penetapan Hasil Rekomendasi Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta rekomendasi Tim Evaluator dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, maka indicator kinerja utama Dinas Koperasi mengalami perubahan. Perjanjian kinerja 2019 adalah sebagaimana rincian tabel dibawah

Tabel 5 .
Perjanjian Kinerja tahun 2019

	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM	Persentase peningkatan nilai asset koperasi	%	9,5
		Persentase peningkatan nilai omset koperasi	%	8,5
		Persentase koperasi aktif	%	78
		Jumlah Produk UKM yang terstandarisasi	Buah	40
2	Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Kategori	BB

Sasaran1 ; Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM

Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya

Peran koperasi dalam pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian daerah, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang.

Koperasi sebagai organisasi social ekonomi memiliki karakteristik yang sesuai untuk dapat mengelola berbagai potensi yang dimiliki daerah secara lebih optimal. Peran koperasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan usaha kolektif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (anggota) dalam kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran. Koperasi juga berperan untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif anggotanya, baik sebagai produsen maupun konsumen. Efisiensi dan efektifitas usaha anggota koperasi dapat dicapai karena pemasaran, pembelian input produksi, pemanfaatan modal dan pengadaan serta penggunaan fasilitas usaha dilakukan secara bersama.

Peran UKM dalam perekonomian dapat ditunjukkan sebagai sumber pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa domestic, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan nilai tambah yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya kualitas koperasi dan UKM indikator kinerjanya adalah :

a. Persentase peningkatan nilai asset koperasi

Nilai asset koperasi merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh koperasi. Nilai asset koperasi terdiri atas kas, piutang, perlengkapan dan peralatan koperasi. Formulasi perhitungan persentase peningkatan nilai asset koperasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Formulasi meningkatnya nilai asset koperasi} = (\text{nilai asset tahun } n - \text{nilai asset thn } n-1 / \text{nilai asset tahun } n-1) \times 100\%$$

b. Persentase peningkatan nilai omset koperasi

Nilai omset koperasi atau volume usaha koperasi adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Dengan demikian volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku sampai dengan akhir tahun buku. Untuk usaha simpan pinjam yang menjadi volume usahanya adalah semua jumlah pinjaman dari anggota koperasi. Sedangkan untuk usaha lain selain simpan pinjam volume usahanya dihitung berdasarkan jumlah penjualan dari usaha koperasi tersebut.

$$\text{Formulasi meningkatnya nilai omset koperasi} = (\text{volume usaha tahun } n - \text{volume usaha thn } n-1 / \text{volume usaha tahun } n-1) \times 100\%$$

c. Persentase koperasi aktif

Perkembangan koperasi di Sumatera Barat saat ini menunjukkan kinerja yang secara umum positif. Perkembangan tersebut menunjukkan kebutuhan yang tinggi terhadap pendampingan dalam penerapan prinsip-prinsip koperasi. Perkembangan koperasi juga dipengaruhi oleh perkembangan koperasi aktif. Karena peningkatan

jumlah koperasi tidak ada artinya apabila jumlah koperasi aktif menurun persentasenya. Formulasi penghitungan persentase koperasi aktif adalah :

$$\text{Formulasi persentase koperasi aktif} = \frac{\text{jumlah koperasi aktif}}{\text{total jumlah koperasi}} \times 100\%$$

d. Jumlah Produk UKM yang terstandarisasi

Pemberdayaan usaha kecil adalah merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Untuk menghadapi tantangan dan persaingan global UKM harus kuat dan mempunyai produk yang berkualitas serta mampu bersaing di pasaran baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Salah satu sarana dalam meningkatkan kualitas serta daya saing produk UKM adalah melalui pendaftaran merek dan sertifikat halal. Adapun tujuan utama pendaftaran merek dan sertifikat halal adalah untuk melindungi produk UKM dari pemalsuan dan penciplakan merek produk. Perlindungan hukum kepada produk UKM dilaksanakan melalui pendaftaran merek ke Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan untuk memberikan rasa aman dan keyakinan bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk makanan dan minuman serta meningkatkan standar kualitas mutu barang yang beredar di pasaran maka diperlukan adanya label halal yang pengurusan Sertifikat Halal ke LPPOM MUI.

Indikator jumlah produk UKM yang terstandarisasi dengan formulasi capaiannya sebagai berikut :

$$\text{Formulasi persentase jumlah produk UKM yang terstandarisasi} = \frac{\text{jumlah produk UKM yang difasilitasi merk dan sertifikat halal}}{\text{total jumlah produk UKM}} \times 100\%$$

Sasaran 2 ; Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi

Tata kelola organisasi merupakan suatu system yang mengatur pengelolaan organisasi yang bertujuan untuk menciptakan organisasi yang memiliki nilai tambah bagi pihak yang berkepentingan. Tata kelola organisasi ini sangat penting karena

dengan adanya tata kelola yang baik maka akan berdampak kepada : 1) meningkatnya kinerja organisasi melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik; 2) mempermudah dalam pengelolaan anggaran yang berdampak pada meningkatnya nilai organisasi; 3) meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak-pihak alinnya.

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya kualitas tata kelola organisasi, indikator yang mempengaruhinya adalah :

a. Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodic.

Kinerja pemerintah harus diukur agar dapat diketahui bagaimana pemerintah melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan mengukur kinerja keuangan dan kinerja non keuangan.

2.4. RENCANA KINERJA SASARAN

Rencana Kinerja Sasaran Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah rencana pencapaian target sasaran yang menjadi sarana bagi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun. Tahun 2019 adalah tahun ketiga untuk Renstra Dinas Koperasi, UKM Tahun 2016-2021 yang lebih rinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6.
Rencana Kinerja Sasaran Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	SASARAN			CARA MENCAPAI SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	Target	KEBIJAKAN STRATEGIS	PROGRAM
1	Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM	1. Persentase peningkatan nilai asset koperasi	9%	Meningkatkan produktifitas, manajemen usaha dan permodalan koperasi	1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 2. Program Peningkatan dan

No	SASARAN			CARA MENCAPAI SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	Target	KEBIJAKAN STRATEGIS	PROGRAM
		2. Persentase peningkatan nilai omset koperasi	8%	Peningkatan usaha koperasi baik simpan pinjam maupun sector riil	1. Program Peningkatan dan Pengembangan daya Saing Koperasi
		3. Persentase koperasi aktif	77,5%	Peningkatan tata kelola organisasi dan SDM pengurus/penge lola koperasi	1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
		4. Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	40bh	Peningkatan pemasaran, promosi serta kemitraan produk UKM, fasilitasi standarisasi produk	1. Program Peningkatan dan Pengembangan daya Saing UMKM
				Peningkatan pendampingan dan akses permodalan	1. Program Peningkatan dan Pengembangan daya Saing UMKM
IV	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	Peningkatan kinerja Dinas Koperasi, UKM pada setiap bidang dan perencanaan setiap kegiatan yang lebih baik	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

No	SASARAN			CARA MENCAPAI SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	Target	KEBIJAKAN STRATEGIS	PROGRAM
					6. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sumber: Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

2.5. RENCANA KINERJA KEGIATAN

Pencapaian Rencana Kinerja Sasaran akan tercapai dengan melaksanakan Program Pemberdayaan koperasi dan UKM yang terdiri atas Kegiatan-Kegiatan Pembangunan koperasi maupun UKM sehingga Pencapaian Kinerja Sasaran akan ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yang akan dicapai adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.

Tabel 7.
Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Koperasi, UKM Tahun 2019

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Pengembangan dan Peningkatan Data dan Informasi	Tersusunnya data dan informasi / Database Koperasi Tahun 2019	1 buku data	
	Pembinaan Kelembagaan Koperasi	Rapat Koordinasi dengan Koordinator PPKL dan PPKL se - Sumatera Barat		40 orang
		Rapat Koordinasi antara Notaris dengan Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat		40 orang
		Rapat Pembinaan Kelembagaan Koperasi Primer dan Sekunder Provinsi		25 org
		Rapat Pembinaan Kelembagaan Koperasi dengan Dinas Yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat		40 orang
		Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award	Jumlah koperasi berprestasi yang dinilai	20 koperasi
	Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan pelayanan izin usaha simpan pinjam	180 org, 9 kab/kota	
	Pembenahan Koperasi Tidak Aktif	Terlaksananya pembenahan koperasi tidak aktif		7 Kabupaten/Kota, yaitu Kab. Pasaman Barat, Kab. Sinjungjung, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Dharmasraya, Kab. Agam, dan Kab. Solok
		Terlaksananya rapat koordinasi Pembenahan Koperasi Tidak Aktif di Provinsi dengan Pejabat/Pembina Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di Kab/Kota se- Sumatera Barat		40 orang
	Sosialisasi dan Peningkatan Peran Koperasi dalam Pengembangan kelompok usaha Strategis	Terlaksananya Lomba Simulasi Tata Cara Pendirian Koperasi		280 orang
		Terlaksananya penyuluhan tata cara pendirian koperasi bagi kelompok UP2K		200 orang
		Terlaksananya penyuluhan perkoperasian bagi Kelompok Kampung KB		200 orang
	Familiarization Trip berbasis koperasi	Publikasi koperasi unggulan pada media lokal		4 media

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
	Penyusunan Ranperda Pembangunan dan Pengembangan Koperasi dan UKM	Perda Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UKM	1 Perda
	Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi bagi pejabat pengawas koperasi	Jumlah peserta bimtek pengawasan koperasi bagi pejabat pengawas provinsi dan kab/kota	120 orang
	Peningkatan pelayanan Mess UPTD	Meningkatnya sarana prasarana mess UPTD Balatkop	ATK, alat listrik dan elektronik, peralatan kebersihan, Infokus 1 unit, layar infokus 2 unit, TV 33 BH, Laptop 1 bh, Printer 4 bh
	Sosialisasi Perkoperasian Dilokasi TMMD/N	Terlaksananya sosialisasi perkoperasian di lokasi TMMDN pada 4 (empat) kabupaten/kota	Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota dan Kab. Solok
	Pembinaan dan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Pembinaan petugas Penilai Kesehatan (Penkes) USP Koperasi prov/kab/kota untuk melakukan penkes	736 orang
	Reviu Penerapan dan Sanksi bagi Koperasi	jumlah koperasi yang direview provinsi/kab/kota	45 koperasi
	Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Hasil pemeriksaan koperasi provinsi dan uji petik usaha simpan pinjam koperasi kab/kota dan tindak lanjut pemeriksaan koperasi provinsi/kab/kota	22 koperasi, 18 koperasi
	Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi	hasil pemeriksaan koperasi provinsi dan uji petik kelembagaan koperasi kab/kota dan tindak lanjut pemeriksaan koperasi provinsi/kab/kota	20 koperasi, 21 koperasi
	Pelatihan Penyusunan Bisnis Plan Bagi Koperasi (DAK)	Terlaksananya pelatihan penyusunan bisnis plan bagi koperasi	3 akt, 90 orang
	Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi Bagi Pengurus Koperasi (DAK)	Terlaksananya pelatihan penguatan kelembagaan koperasi bagi pengurus koperasi	3 akt, 90 orang
	Pelatihan Akuntansi Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi (DAK)	Terlaksananya Pelatihan Akuntansi bagi pengurus/pengelola koperasi	2 akt, 100 orang
	Pelatihan Tata Cara Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Bagi Pengurus /Pengelola Koperasi (DAK)	Terlaksananya Pelatihan Akuntansi bagi pengurus/pengelola koperasi	2 akt, 60 orang
	Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi Bagi Pengurus Koperasi di Daerah Tertinggal (DAK)	Terlaksananya pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi bagi Pengurus Koperasi di daerah tertinggal	2 akt, 80 orang
	Pelatihan Penguatan Pengawasan Bagi Pengurus/Pengawas Koperasi (DAK)	Terlaksananya pelatihan penguatan pengawasan bagi pengurus/pengawas koperasi	2 akt, 60 orang

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING KOPERASI	Pelatihan SOM pengelolaan simpan pinjam pembiayaan syariah oleh koperasi bagi pengurus/pengelola	Terlaksananya pelatihan pengembangan usaha koperasi sector riil	2 akt, 60 orang
	Peningkatan usaha KSP/USP Koperasi	Terlaksananya Bimtek peningkatan usaha KSP/USP koperasi	105 orang
		Terlaksananya studi tiru pelaporan simpan pinjam oleh koperasi ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	4 orang
	Peningkatan kapasitas usaha koperasi sektor pertanian dan perkebunan	Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Sektor Pertanian komoditi jagung di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Agam	32 org/kab/kota
		Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Sektor Perternakan Sapi Intergrasi dengan perkebunan sawit dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya	32 orang
	Peningkatan kapasitas usaha koperasi sektor peternakan dan perikanan	Terlaksananya Bimtek Pembinaan Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi sector peternakan dan perikanan	105 orang
	Pembinaan Usaha Sektor Riil koperasi menuju kemitraan usaha	Bimtek Pembinaan Usaha Sektor Riil Koperasi Menuju Kemitraan	Kabupaten Solok Selatan Komoditi Kopi, Kabupaten Limapuluh Kota peternakan sapi dan Kabupaten Pasaman Barat peternakan sapi
	Pembinaan Usaha Koperasi Melalui Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)	Terlaksananya Partisipasi pada Harkopnas Expo ke-72	2 koperasi
		Terlaksananya Peringatan Acara Puncak Hari Koperasi ke-72 Tingkat Provinsi	700 orang
	Peningkatan Usaha Koperasi yang Mengelola Produk Unggulan daerah dengan Pendekatan OVOP	Terlaksananya bimtek bagi pengelola PUD dengan pendekatan OVOP melalui koperasi	120 orang
		Terlaksananya Temu Usaha Koperasi Penglola PUD dengan Pendekatan OVOP	60 orang
	Peningkatan Permodalan Koperasi	Terlaksananya Bimtek Peningkatan Permodalan Koperasi di Kab. Agam, Kab. Tanah datar, Kab.	35 orang/kab/kota
	Peningkatan Peran Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pola Syariah	Bimbingan teknis peningkatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pola Syariah	35 orang/kab/kota

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
	Pelatihan Dewan Syariah Bagi KSPPS/USPPS Koperasi (DAK)	Terlaksananya pelatihan Dewan Syariah Bagi KSPPS/USPPS Koperasi	59 orang, 2 akt
	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Koperasi Jasa Keuangan Bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola (DAK)	Terlaksananya pelatihan Sertifikasi Kompetensi Koperasi Jasa Keuangan Bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola	1 akt, 30 orang
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING UMKM	Pengembangan UMKM Kerajinan Unggulan Sumatera Barat	Bimtek Pengembangan Motif Sulam dan Tenun	60 orang
		Bimtek Pengembangan Kreasi desain dan pewarnaan	60 orang
		Sosialisasi pemasaran produk secara online	50 orang
		Temu bisnis di Jakarta yang dilaksanakan bertepatan dengan Ivent Ina Craft 2019	3 MOU
		Temu bisnis di kota Medan yang dilaksanakan dalam rangkaian Event Sumatera Barat Expo 2019	8 MOU
		Terlaksananya Promosi/pameran	Jakarta, Thailan, Malaysia
	Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM Ke Perbankan Dan Lembaga Non Bank	Terlaksananya Sosialisasi Skim Kredit Pembiayaan UMKM ke Perbankan dan Lembaga Non Bank	150 orang
		Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Skim Kredit Pembiayaan/permodalan UMKM ke Perbankan dan Lembaga Non Bank	35 orang
	Pembuatan buku databased UKM unggulan Sumatera Barat	Jumlah buku data based UKM makanan dan minuman unggulan	250 buku
	Pelatihan kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM	Terlaksananya pelatihan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM	530 orang
Peningkatan kapasitas kewirausahaan	Terlaksananya Bimtek	60 orang	
	Terlaksananya penjajakan pemasaran produk UMKM unggulan Sumatera Barat ke Provinsi Riau	4 UKM	
Pengadaan sarana dan prasarana PLUT	Tersedianya sarana dan prasarana PLUT KUKM	lemari panjang 2 unit, AC 9 unit, computer 2 nit, notebook 1 unit, meja kerja pejabat 2 unit, Meja kerja rapat 10 unit, kursi rapat, 38 buah, infokus 1 unit	

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
	Pengembangan Produk UKM Binaan Sumatera Barat	Terlaksananya bimtek standarisasi produk UMKM bagi Pelaku UKM Binaan Sumatera Barat	90 orang
		Terlaksananya Bimtek pengembangan kewirausahaan dan kualitas prodak di kampung KB	30 orang
		Pelaksanaan rapat koordinasi pemberdayaan usaha pemula	74 orang
	Perkuatan produk UMKM	Terlaksananya bimtek peningkatan kualitas kemasan label dan paper bag produk UMKM	120 orang
		Penyerahan prototip Kemasan Label dan Paper Bag	50 UKM
	Peningkatan Gerakan Terpadu Persejahteraan UMKM Sumatera Barat	Promosi/Gelar Produk Unggulan binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat	70 UKM
		Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah se Sumatera Barat	55 UKM
		Bimtek Kurasi Produk UKM Unggulan Sumatera Barat Dalam rangka pengembangan Jaringan	120 UKM
	Partisipasi promosi produk UMKM	Pameran Indonesian Handycraft dengan tema " <i>Jakarta Enjoyable multicultural diversities</i> "	2 UKM
		Bazar Ramadhan	120 UKM
		Pameran dan Bazar dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK ke 47 tahun 2019	3 UKM
		Terlaksananya Pawai Alegoris	2 UKM
		Terlaksananya pameran Sumatera Barat EXPO 2019	2 UKM
	Sosialisasi Pendaftaran Merek dan Sertifikat Halal dan PIRT	Sosialisasi tentang pendaftaran merk dan sertifikat halal	25 UKM
		Identifikasi UKM yang akan diusulkan pendaftaran merk dan halal	19 Kab/Kota
	Pelatihan Teknik Penyusunan Proposal Bagi Pelaku UKM (DAK)	Terlaksananya Pelatihan Teknis Penyusunan Proposal bagi Pelaku UMKM	1 akt, 30 orang
	Pelatihan Kewirausahaan Bagi UKM di Daerah Pesisir (DAK)	Terlaksananya pelatihan Kewirausahaan bagi Koperasi didaerah pesisir	530 orang

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
	Pelatihan Pengembangan Usaha Bagi UKM di Kawasan Wisata (DAK)	Terlaksananya pelatihan pengembangan usaha bagi UMKM	150 orang
	Pelatihan Kewirausahaan Dalam Pengembangan Produk Unggul Bagi UMKM (DAK)	Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan dalam pengembangan produk Unggulan bagi UMKM	1 akt, 50 orang
	Pelatihan Pengembangan Usaha dan Inovasi Pangan Berbasis Umbi-umbian dan Sagu (DAK)	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan usaha dan inovasi pangan berbasis umbi-umbian dan Sagu	3 akt, 120 orang
	Monitoring ,Evaluasi dan Pembinaan Tenaga Pendamping (DAK)	Jumlah tenaga pendamping	23 orang

Sumber: Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

2.6. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Dalam rangka mendukung capaian sasaran kinerja dan indikator kinerja utama, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi APBD Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 23.908.255.625,- . yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci, Rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8.
Rencana Anggaran Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
	BELANJA	23,908,255,625	
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,654,974,266	32,02
II	BELANJA LANGSUNG	16,253,281,359	67,98

Sumber: APBD Perubahan Sumbar 2019

Dari tabel 8 diatas dilihat proporsi antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2019, dimana porsi Belanja Tidak Langsung dimanfaatkan untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai dimana jumlah pegawai Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebanyak 70 orang. Sementara Belanja

Langsung sangat signifikan jumlahnya yang dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan belanja modal dan pemberdayaan Koperasi dan UKM.

Alokasi anggaran Belanja Langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pemberdayaan koperasi dan UKM dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9.
Alokasi Dana per Sasaran Tahun Anggaran 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Anggaran (%)
1.	Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM	- Persentase peningkatan nilai asset koperasi	1.325.644.250	6,94
		- Persentase peningkatan nilai asset koperasi	1.019.000.650	5,33
		- Persentase koperasi aktif	3.548.636.604	18,58
		- Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	7.350.979.500	38,49
4.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	5.908.808.305	30,94
Jumlah Belanja Langsung			19.099.505.365	100

Pada Tabel 9 di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 19.099.505.365,- dengan persentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran meningkatnya daya saing koperasi yaitu sebesar 69,06%. Sasaran Terwujudnya Meningkatkan Tata Kelola Organisasi yaitu sebesar 30,94% dari total anggaran Belanja Langsung.

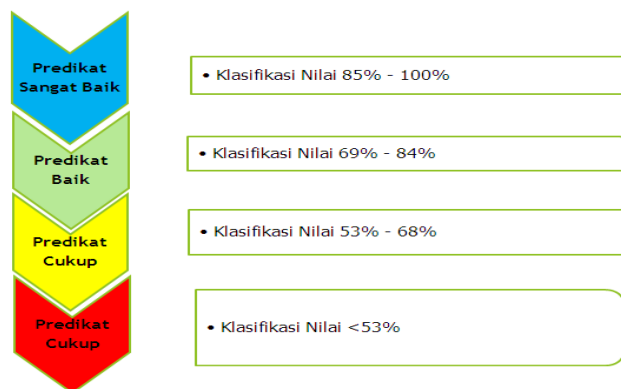
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian peningkatan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh OPD. Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai Permen PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menindaklanjuti arahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pengukuran kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut :



Gambar 1 : Skala Nilai Perangkat Kinerja

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan pelaporan akuntabilitas. OPD dapat dikatakan berhasil jika indikator-indikator yang ditetapkan telah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran. Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian tujuan dan sasaran OPD.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 065-1038-2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 065-832-2018 tentang Penetapan Hasil Rekomendasi Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Koperasi mempunyai tujuan " Meningkatkan Peran Koperasi dan UKM dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat".

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM
2. Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi

Berkenaan dengan pencapaian sasaran strategis tersebut diatas, pengukuran kinerja dilakukan dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam bentuk persentase, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, dan membandingkan realisasi kinerja dengan standar serta membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja provinsi lain yang berdekatan. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam Gambar 1 akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh Tabel 10.

Tabel 10.
Capain Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Stretegis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas Koperasi dan UKM	Persentase peningkatan nilai asset koperasi	%	9,5	9,55	100,53%
		Persentase peningkatan nilai omset koperasi	%	8,5	8,55	100,59%
		Persentase koperasi aktif	%	78	78,03	100,04%
		Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	buah	40	45	112,5%
Rata-rata Capaian Sasaran 1						103.42%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	kategori	BB	B	95,36%
Rata-rata Capaian Sasaran 2						95,36%
Rata-rata capaian Sasaran 1 dan sasaran 2						99,39%

Sumber : Dinas Koperasi, UKM Prov Sumatera Barat

Dari Tabel 10 diatas, hasil pengukuran kinerja menunjukkan 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2019 berhasil mencapai tingkat capaian yang telah ditetapkan dengan rata-rata pencapaian sasaran strategis sebesar 99,39% yang termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**.

Dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis yang terdapat pada tabel diatas dapat dilihat secara umum bahwa pencapaian kinerja pada kategori berhasil (sesuai bahkan beberapa indikator capaiannya melebihi target). Capaian realisasi indikator tertinggi adalah jumlah produk UKM yang terstandarisasi. Sangat baiknya pencapaian indicator tersebut disebabkan karena banyak sekali program-program pemerintah dalam mendukung peningkatan kredit UMKM untuk pengembangan usaha.

3.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Tabel 10, selanjutnya sub bab ini akan menguraikan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran strategis. Evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja (*outcome*) sasaran dengan melihat secara lebih rinci pada capaian target indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dengan dukungan data atau informasi hasil sasaran secara menyeluruh.

Capaian sasaran strategis diperoleh dari rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat disajikan sebagai berikut:

I. Meningkatnya Peran Koperasi dan UKM dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Tujuan " Meningkatnya Peran Koperasi dan UKM dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dicapai dengan menetapkan sasaran strategis " Meningkatnya kualitas Koperasi dan UKM" yang diukur dengan 4 (empat) indicator kinerja. Tujuan , sasaran dan indicator dapat dilihat pada gambar berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran koperasi dan UKM dalam meningkatkan pendapatan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas koperasi dan UKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase peningkatan nilai asset koperasi • Persentase peningkatan nilai omset koperasi • Persentase koperasi aktif • Jumlah produk UKM yang terstandarisasi

Gambar 2 : Tujuan dan Sasaran Strategis I

Pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas Koperasi dan UKM” didukung oleh pencapaian 4 (empat) indicator kinerja. Pencapaian target dari indicator tersebut adalah :

1. Persentase Peningkatan Nilai Asset Koperasi

Nilai asset koperasi terdiri atas modal luar dan modal sendiri. Modal sendiri terdiri atas : simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan hibah. Sedangkan modal luar berasal dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya serta sumber lain yang sah. Peningkatan nilai asset koperasi pada tahun 2019 adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 11.
Pencapaian Kinerja Indikator
Persentase Peningkatan Nilai Asset Koperasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan nilai asset koperasi	9,5%	9,55%	100,53%

Dari Tabel 11 tersebut terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Peningkatan Nilai Asset Koperasi Tahun 2019

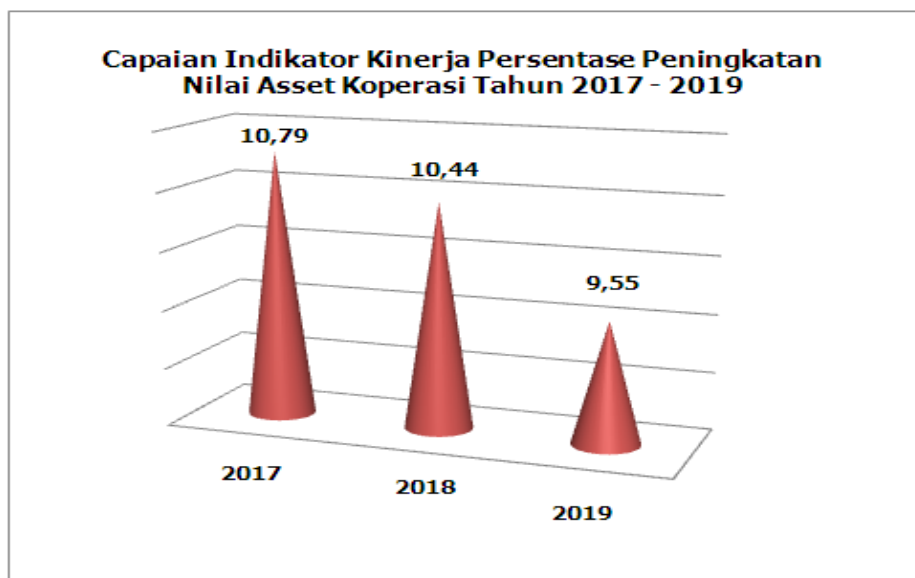
berhasil dicapai dengan capaian sebesar 100,53% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 100,53% diatas adalah bahwa nilai asset koperasi di Sumatera Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan nilai asset koperasi ini akan berdampak kepada peningkatan SHU bagi anggota koperasi.

Tabel 12.
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Peningkatan Nilai Asset Koperasi Tahun 2017 s/d Tahun 2019

Indikator	Target 2019	Realisasi		
		2017	2018	2019
Persentase peningkatan nilai asset koperasi	9,5%	10,79%	10,44%	9,55%

Dari Tabel 12 diatas dapat dilihat bahwa capaian indicator kinerja Persentase peningkatan nilai asset koperasi tahun 2019 lebih rendah 0,89% dari tahun 2018. Rendahnya capaian kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 disebabkan karena pada tahun 2019 banyak koperasi yang menurunkan suku bunga pinjaman yang pada akhirnya berdampak kepada penurunan dana cadangan yang salah satu fungsinya adalah sebagai tambahan/pemupukan modal koperasi yang bersumber dari SHU koperasi.

Capaian indicator kinerja Persentase peningkatan nilai asset koperasi Tahun 2017 s.d Tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar. 3



Gambar 3. Capaian Indikator Kinerja Presentase Peningkatan Nilai Asset Koperasi Tahun 2017 s.d Tahun 2019

Tabel 13.

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Presentase Peningkatan Nilai Asset Koperasi sampai Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Indikator	Target akhir Renstra/ RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Kemajuan (%)
Persentase peningkatan nilai asset koperasi	10,5%	9,55%	90,95

Tabel 13 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator persentase peningkatan nilai asset koperasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada akhir RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel di atas dimana tingkat kemajuan pencapaian target adalah 90,95%.

Tabel 14.
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Presentase Peningkatan Nilai Asset Koperasi dengan Capaian Kinerja RPJMN (Kementerian Koperasi dan UKM RI/T)

Indikator	Realisasi			Ket
	Sumbar 2019	Sumbar 2018	Kemenkop 2019	
Persentase peningkatan nilai asset koperasi	9,55%	10,44%	7,78%	

Dari Tabel 14 dapat dilihat bahwa indicator persentase peningkatan nilai asset koperasi Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi apabila dibandingkan dengan standar nasional.

Tabel 15.
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Presentase Peningkatan Nilai Asset Koperasi dengan Capaian Kinerja Provinsi Sumatera Selatan

Indikator	Realisasi Tahun 2019		Ket
	Sumbar	Sumsel	
Persentase peningkatan nilai asset koperasi	9,55%	6,27%	Lebih tinggi

Apabila dilihat pada tabel diatas, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase peningkatan nilai asset koperasi Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Selatan.

2. Persentase Peningkatan Nilai Omset Koperasi

Omset koperasi atau volume usaha koperasi adalah total nilai pendapatan barang dan jasa pada tahun buku yang bersangkutan yang terdiri dari volume usaha simpan pinjam dan volume usaha lainnya atau sector riil. Pada hakekatnya aktivitas ekonomi koperasi dapat dilihat dari besaran volume usaha

koperasi. Peningkatan nilai omset koperasi pada tahun 2019 adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Tabel 16.
Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Peningkatan Nilai Omset Koperasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan nilai omset koperasi	8,5%	8,55%	100,59%

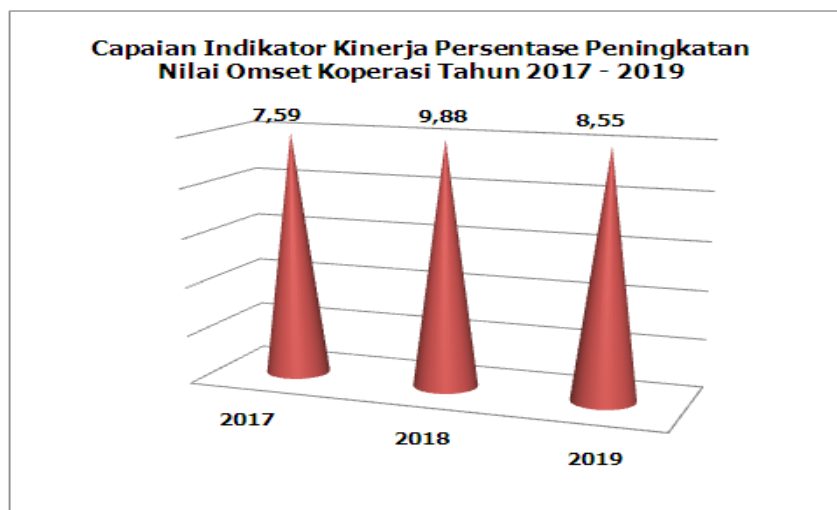
Dari Tabel 16 tersebut terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Peningkatan Nilai Omset Koperasi Tahun 2019 berhasil dicapai dengan capaian sebesar 100,59% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 100,59% diatas adalah bahwa volume usaha koperasi di Sumatera Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan Omset koperasi ini akan berdampak kepada peningkatan SHU bagi anggota koperasi.

Tabel 17.
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Peningkatan Nilai Omset Koperasi Tahun 2017 s/d Tahun 2019

Indikator	Target 2019	Realisasi		
		2017	2018	2019
Persentase peningkatan nilai omset koperasi	8,5%	7,59%	9,88%	8,55%

Dari Tabel 17 diatas dapat dilihat bahwa capaian indicator kinerja Persentase peningkatan nilai omset koperasi tahun 2019 lebih rendah 1,33% dari tahun 2018. Rendahnya capaian kinerja ini disebabkan karena turunnya harga beberapa komoditi seperti kelapa sawit, jagung, dan lain-lain. .

Capaian indicator kinerja Persentase peningkatan nilai omset koperasi Tahun 2017 s.d Tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar.4



Gambar 4 Capaian Indikator Kinerja Presentase Peningkatan Nilai Omset Koperasi Tahun 2017 s.d Tahun 2019

Tabel 18.

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Presentase Peningkatan Nilai Omset Koperasi sampai Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Indikator	Target akhir Renstra/ RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Kemajuan (%)
Persentase peningkatan nilai omset koperasi	9,5%	8,55%	90%

Tabel 18 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja masing-masing indikator persentase peningkatan nilai omset koperasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada akhir RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel di atas di mana tingkat kemajuan pencapaian target adalah 90%.

Tabel 19.
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Presentase Peningkatan Nilai Omset Koperasi dengan Capaian Kinerja RPJMN (Kementerian Koperasi dan UKM RI)

Indikator	Realisasi			Ket
	Sumbar 2018	Sumbar 2019	Kemenkop 2019	
Persentase peningkatan nilai omset koperasi	9,88%	8,55%	6,07	

Pada Tabel 19 dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator presentase peningkatan nilai omset koperasi Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian nasional

Tabel 20.
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Presentase Peningkatan Nilai Omset Koperasi dengan Capaian Kinerja Provinsi Sumatera Selatan

Indikator	Realisasi Tahun 2019		Ket
	Sumbar	Sumsel	
Persentase peningkatan nilai omset koperasi	8,55%	4,6%	Lebih tinggi

Indikator Kinerja Utama presentase peningkatan nilai omset koperasi pada tabel 20 diatas terlihat bahwa realisasi capaian Sumatera Barat lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 3,95% atau dengan capaian sangat baik.

3. Persentase Koperasi Aktif

Perkembangan koperasi di Sumatera Barat saat ini menunjukkan kinerja yang secara umum positif. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa koperasi masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Perkembangan koperasi juga dipengaruhi oleh perkembangan koperasi aktif. Karena peningkatan jumlah koperasi tidak ada artinya apabila jumlah koperasi aktif menurun.

Capaian indikator "Persentase Koperasi Aktif adalah sebagai berikut:

Tabel 21.
Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Koperasi Aktif

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Koperasi Aktif	78%	78,03%	100.04%

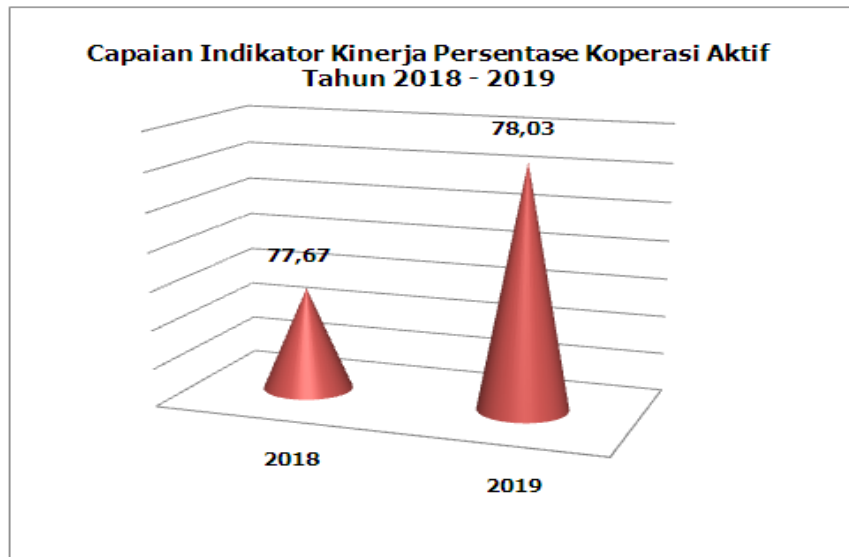
Dari Tabel 21 tersebut terlihat bahwa capaian indicator presentase koperasi aktif sangat baik. Perkembangan koperasi aktif di Sumatera Barat setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Total jumlah koperasi di Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 adalah sebanyak 3.805 unit.

Tabel 22.
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Koperasi Aktif Tahun 2017 s/d Tahun 2019

Indikator	Target 2019	Realisasi		
		2017	2018	2019
Persentase Koperasi Aktif	78%	-	77,67%	78,03%

Dari Tabel 22 diatas dapat dilihat bahwa realisasi indicator persentase koperasi aktif tahun 2019 lebih tinggi 0,36% dari tahun 2018, sedangkan tahun 2017 tidak ada karena indicator ini merupakan indicator baru hasil evaluasi KemenPAN RI atas Sakip Provinsi Sumatera Barat dan baru muncul pada perubahan Renstra Tahun 2018.

Capaian indicator kinerja Persentase koperasi aktif Tahun 2018 s.d Tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar. 5



Gambar 5. Capaian Indikator Kinerja Presentase Koperasi Aktif Tahun 2018 s.d Tahun 2019

Tabel 23.

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Presentase Koperasi Aktif sampai Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Indikator	Target akhir Renstra/ RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Kemajuan (%)
Persentase peningkatan nilai omset koperasi	79%	78,03%	98,77

Tabel 23 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator persentase koperasi aktif jika dibandingkan dengan target kinerja pada akhir RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel di atas dimana tingkat kemajuan pencapaian target adalah 98,77%.

Tabel 24.
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Presentase Koperasi Aktif dengan Capaian Kinerja RPJMN (Kementerian Koperasi dan UKM RI)

Indikator	Realisasi			Ket
	Sumbar 2019	Sumbar 2018	Kemenkop 2019	
Persentase koperasi aktif	78,03	77,67%	72,49%	Lebih tinggi

Apabila dilihat dari Tabel 24 diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja indicator presentase koperasi aktif di Indonesia lebih rendah dari capaian Provinsi Sumatera Barat. Namun apabila dilihat secara keseluruhan persentase koperasi aktif ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah koperasi aktif inimerupakan dampak nyata dari reformasi koperasi. Dalam rangkareformasi koperasi dengan penataan/pemutakhiran data Koperasidan UMKM melalui ODS dengan pemberian sertifikat NIK bagi Koperasi Aktif dan melaksanakan RAT sesuai dengan peraturan perundangan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 jumlah koperasi yang memiliki sertifikat NIK adalah sebanyak 1.391 unit atau sebesar 71,91% . Apabila dilihat dari tingkat nasional peringkat 1 capaian jumlah koperasi yang mendapatkan sertifikat NIK tertinggi adalah Provinsi Sumatera Barat, DI Yogyakarta peringkat 2 sebesar 71,56% dan diikuti oleh Provinsi Jawa Timur dengan capaian 55,56%, Provinsi Bali dengan capaian 53,82%, dan Provinsi Banka Belitung dengan capaian 48,69%.

Tabel 25.
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Koperasi Aktif dengan Capaian Kinerja Provinsi Sumatera Selatan

Indikator	Realisasi Tahun 2018		Ket
	Sumbar	Sumsel	
Persentase koperasi aktif	78,03%	62,74%	Lebih tinggi

Indikator Kinerja Utama presentase koperasi aktif pada tabel 25 diatas terlihat bahwa realisasi capaian Sumatera Barat lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 15,29% atau dengan capaian sangat baik

4. Jumlah Produk UKM yang terstandarisasi

Perekonomian Provinsi Sumatera Barat akan memiliki fundamental yang kuat jika ekonomi kerakyatan menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing tinggi. Pengalaman menunjukkan bahwa UKM memiliki ketangguhan terhadap guncangan perekonomian global. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya mendorong pengelolaan UKM untuk meningkatkan SDM dan kualitas produk serta memberikan perlindungan kepada produk UKM agar memiliki daya saing. Dalam rangka melindungi produk UKM, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi UKM untuk mendapatkan standarisasi produk melalui pendaftaran merk dan sertifikat halal Capaian indikator "Jumlah produk UKM yang terstandarisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 26.
Pencapaian Kinerja Indikator Jumlah Produk UKM yang Terstandarisasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Produk UKM yang Terstandarisasi	40 bh	45 bh	112,5%

Dari Tabel 26 tersebut terlihat bahwa capaian indikator jumlah produk UKM yang terstandarisasi sangat baik. Jumlah UKM yang difasilitasi standarisasi produk terdiri atas pendaftaran merk sebanyak 25 buah produk UKM dan sertifikat halal sebanyak 20 produk UKM.

Tabel 27.
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Produk UKM yang Terstandarisasi Tahun 2018 dan Tahun 2019

Indikator	Target 2019	Realisasi	
		2018	2019
Jumlah Produk UKM yang Terstandarisasi	40 bh	-	45 bh

Dari Tabel 27 diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator jumlah produk UKM yang terstandarisasi tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2018 karena indikator ini merupakan indikator baru hasil evaluasi KemenPAN RI atas Sakip Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 28
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Produk UKM yang terstandarisasi sampai Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Indikator	Target akhir Renstra/ RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Kemajuan (%)
Jumlah Produk UKM yang Terstandarisasi	40 bh	45 bh	112,5%

Tabel 28 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator jumlah produk UKM yang terstandarisasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada akhir RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan capaian sangat baik. Hal ini perlu menjadi perhatian Dinas Koperasi, UKM agar

target capaian kinerja pada akhir RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dapat terealisasi sangat baik.

Tabel 29.
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Produk UKM yang Terstandarisasi dengan Capaian Kinerja RPJMN (Kementerian Koperasi dan UKM RI)

Indikator	Realisasi			Ket
	Sumbar 2019	Sumbar 2017	Kemenkop 2018	
Jumlah Produk UKM yang Terstandarisasi	45 bh	-	2.546 bh	-

Dari Tabel 29 dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator jumlah produk UKM yang terstandarisasi Provinsi Sumatera Barat apabila dibandingkan dengan capaian nasional terlihat bahwa hanya 1,77% UKM yang difasilitasi dibandingkan dengan jumlah UKM yang difasilitasi Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Tabel 30.
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase UKM Binaan Naik Kelas dengan Capaian Kinerja Provinsi Sumatera Selatan

Indikator	Realisasi Tahun 2018		Ket
	Sumbar	Sumsel	
Jumlah Produk UKM yang Terstandarisasi	40 bh	-	

Indikator Kinerja Utama jumlah produk UKM yang terstandarisasi pada tabel 30 diatas tidak dapat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan karena bukan merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui tiga program dengan pembiayaan APBD murni maupun DAK serta 1 (satu)

program melalui anggaran Dekonsentrasi APBN. Program dimaksud adalah:

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) kegiatan yaitu:
 - a) Pengembangan dan Peningkatan Data dan Informasi
 - b) Pembinaan Kelembagaan Koperasi
 - c) Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award
 - d) Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi
 - e) Pembenahan Koperasi Tidak Aktif
 - f) Sosialisasi dan Peningkatan Peran Koperasi dalam Pengembangan kelompok usaha Strategis
 - g) Familirization Trip berbasis koperasi
 - h) Penyusunan Ranperda Pembangunan dan Pengembangan Koperasi dan UKM
 - i) Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi bagi pejabat pengawas koperasi
 - j) Peningkatan pelayanan Mess UPTD
 - k) Sosialisasi Perkoperasian Dilokasi TMMD/N
 - l) Pembinaan dan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
 - m) Reviu Penerapan dan Sanksi bagi Koperasi
 - n) Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
 - o) Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi
 - p) Pelatihan Penyusunan Bisnis Plan Bagi Koperasi (DAK)
 - q) Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi Bagi Pengurus Koperasi (DAK)
 - r) Pelatihan Akuntansi Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi (DAK)
 - s) Pelatihan Tata Cara Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Bagi Pengurus /Pengelola Koperasi (DAK)

- t) Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi Bagi Pengurus Koperasi di Daerah Tertinggal (DAK)
 - u) Pelatihan Penguatan Pengawasan Bagi Pengurus/Pengawas Koperasi (DAK)
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi, yang terdiri atas 11 (Sebelas) kegiatan, yaitu :
- a) Pelatihan SOM pengelolaan simpan pinjam pembiayaan syariah oleh koperasi bagi pengurus/pengelola
 - b) Peningkatan usaha KSP/USP Koperasi
 - c) Peningkatan kapasitas usaha koperasi sektor pertanian dan perkebunan
 - d) Peningkatan kapasitas usaha koperasi sektor peternakan dan perikanan
 - e) Pembinaan Usaha Sektor Riil koperasi menuju kemitraan usaha
 - f) Pembinaan Usaha Koperasi Melalui Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)
 - g) Peningkatan Usaha Koperasi yang Mengelola Produk Unggulan daerah dengan Pendekatan OVOP
 - h) Peningkatan Permodalan Koperasi
 - i) Peningkatan Peran Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pola Syariah
 - j) Pelatihan Dewan Syariah Bagi KSPPS/USPPS Koperasi (DAK)
 - k) Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Koperasi Jasa Keuangan Bagi Pengurus /Pengawas/Pengelola (DAK)
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM yang terdiri atas 17 (tujuh belas) kegiatan yaitu:
- a) Pengembangan UMKM Kerajinan Unggulan Sumatera Barat
 - b) Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM Ke Perbankan Dan Lembaga Non Bank
 - c) Pembuatan buku databased UKM unggulan Sumatera Barat
 - d) Pelatihan kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM

- e) Peningkatan kapasitas kewirausahaan
 - f) Pengadaan sarana dan prasarana PLUT
 - g) Pengembangan Produk UKM Binaan Sumatera Barat
 - h) Perkuatan produk UMKM
 - i) Peningkatan Gerakan Terpadu Persejahteraan UMKM Sumatera Barat
 - j) Partisipasi promosi produk UMKM
 - k) Sosialisasi Pendaftaran Merek dan Sertifikat Halal dan PIRT
 - l) Pelatihan Teknik Penyusunan Proposal Bagi Pelaku UKM (DAK)
 - m) Pelatihan Kewirausahaan Bagi UKM di Daerah Pesisir (DAK)
 - n) Pelatihan Pengembangan Usaha Bagi UKM di Kawasan Wisata (DAK)
 - o) Pelatihan Kewirausahaan Dalam Pengembangan Produk Unggul Bagi UMKM (DAK)
 - p) Pelatihan Pengembangan Usaha dan Inovasi Pangan Berbasis Umbi-Umbian dan Sagu (DAK)
 - q) Monitoring ,Evaluasi dan Pembinaan Tenaga Pendamping (DAK)
4. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi yang terdiri atas 4 (kegiatan) kegiatan yaitu:
- a) Satuan tugas pengawas koperasi
 - b) Operasional PLUT
 - c) Fasilitasi pameran dan promosi KUKM di daerah
 - d) Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan

Secara keseluruhan, kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kinerjanya sangat baik. Hal ini bisa dilihat dari realisasi capaian target indikator sasaran melalui hasil dan capaian indikator kinerja kegiatan yang dapat dilihat dari Tabel 36.

Tabel 31
Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis I Tahun 2019

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi (Capaian)	Persentase Capaian	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Pengembangan dan Peningkatan Data dan Informasi	Tersusunnya data dan informasi / Database Koperasi Tahun 2019	1 buku data	1 buku data	100%	
	Pembinaan Kelembagaan Koperasi	Rapat Koordinasi dengan Koordinator PPKL dan PPKL se - Sumatera Barat		40 orang	40 orang	100%
		Rapat Koordinasi antara Notaris dengan Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat		40 orang	40 orang	100%
		Rapat Pembinaan Kelembagaan Koperasi Primer dan Sekunder Provinsi		25 org	25 org	100%
		Rapat Pembinaan Kelembagaan Koperasi dengan Dinas Yang Membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat		40 orang	40 orang	100%
		Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award	Jumlah koperasi berprestasi yang dinilai	20 koperasi	20 koperasi	100%
	Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan pelayanan izin usaha simpan pinjam	180 org, 9 kab/kota	180 org, 9 kab/kota	100%	
	Pembenahan Koperasi Tidak Aktif	Terlaksananya pembenahan koperasi tidak aktif	7 Kabupaten/Kota, yaitu Kab. Pasaman Barat, Kab. Sinjunjung, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Dharmasraya, Kab. Agam, dan Kab. Solok	7 Kabupaten/Kota, yaitu Kab. Pasaman Barat, Kab. Sinjunjung, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Dharmasraya, Kab. Agam, dan Kab. Solok	100%	
		Terlaksananya rapat koordinasi Pembenahan Koperasi Tidak Aktif di Provinsi dengan Pejabat/Pembina Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di Kab/Kota se- Sumatera Barat		40 orang	40 orang	100%
	Sosialisasi dan Peningkatan Peran Koperasi dalam	Terlaksananya Lomba Simulasi Tata Cara Pendirian Koperasi		280 orang	280 orang	100%
		Terlaksananya penyuluhan tata cara pendirian koperasi bagi kelompok UP2K		200 orang	200 orang	100%
		Terlaksananya penyuluhan perkoperasian bagi Kelompok Kampung KB		200 orang	200 orang	100%
	Familirization Trip berbasis koperasi	Publikasi koperasi unggulan pada media lokal		4 media	4 media	100%
	Penyusunan Ranperda Pembangunan dan Pengembangan Koperasi dan UKM	Perda Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UKM		1 Perda	1 Perda	100%
	Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi bagi pejabat pengawas koperasi	Jumlah peserta bimtek pengawasan koperasi bagi pejabat pengawas provinsi dan kab/kota		120 orang	120 orang	100%
	Peningkatan pelayanan Mess UPTD	Meningkatnya sarana prasarana mess UPTD Balatkop		ATK, alat listrik dan elektronik, peralatan kebersihan, Infokus 1 unit, layar infokus 2 unit, TV 33 BH, Laptop 1 bh, Printer 4 bh	ATK, alat listrik dan elektronik, peralatan kebersihan, Infokus 1 unit, layar infokus 2 unit, TV 33 BH, Laptop 1 bh, Printer 4 bh	100%
	Sosialisasi Perkoperasian Dilokasi TMMD/N	Terlaksananya sosialisasi perkoperasian di lokasi TMMDN pada 4 (empat) kabupaten/kota		Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota dan Kab. Solok Selatan	Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota dan Kab. Solok Selatan	100%

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi (Capaian)	Persentase Capaian
	Pembinaan dan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam	Pembinaan petugas Penilai Kesehatan (Penkes) USP Koperasi prov/kab/kota untuk melakukan penkes	736 orang	736 orang	100%
	Reviu Penerapan dan Sanksi bagi Koperasi	jumlah koperasi yang direviu provinsi/kab/kota	45 koperasi	45 koperasi	100%
	Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Hasil pemeriksaan koperasi provinsi dan uji petik usaha simpan pinjam koperasi kab/kota dan tindak lanjut pemeriksaan koperasi provinsi/kab/kota	22 koperasi, 18 koperasi	22 koperasi, 18 koperasi	100%
	Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi	hasil pemeriksaan koperasi provinsi dan uji petik kelembagaan koperasi kab/kota dan tindak lanjut pemeriksaan koperasi provinsi/kab/kota	20 koperasi, 21 koperasi	20 koperasi, 21 koperasi	100%
	Pelatihan Penyusunan Bisnis Plan Bagi Koperasi (DAK)	Terlaksananya pelatihan penyusunan bisnis plan bagi koperasi	3 akt, 90 orang	3 akt, 90 orang	100%
	Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi Bagi Pengurus Koperasi (DAK)	Terlaksananya pelatihan penguatan kelembagaan koperasi bagi pengurus koperasi	3 akt, 90 orang	3 akt, 90 orang	100%
	Pelatihan Akuntansi Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi (DAK)	Terlaksananya Pelatihan Akuntansi bagi pengurus/pengelola koperasi	2 akt, 100 orang	2 akt, 100 orang	100%
	Pelatihan Tata Cara Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Bagi Pengurus /Pengelola Koperasi (DAK)	Terlaksananya Pelatihan Akuntansi bagi pengurus/pengelola koperasi	2 akt, 60 orang	2 akt, 60 orang	100%
	Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi Bagi Pengurus Koperasi di Daerah Tertinggal (DAK)	Terlaksananya pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi bagi Pengurus Koperasi di daerah tertinggal	2 akt, 80 orang	2 akt, 80 orang	100%
	Pelatihan Penguatan Pengawasan Bagi Pengurus/Pengawas Koperasi (DAK)	Terlaksananya pelatihan penguatan pengawasan bagi pengurus/pengawas koperasi	2 akt, 60 orang	2 akt, 60 orang	100%
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING KOPERASI	Pelatihan SOM pengelolaan simpan pinjam pembiayaan syariah oleh koperasi bagi pengurus/pengelola	Terlaksananya pelatihan pengembangan usaha koperasi sector riil	2 akt, 60 orang	2 akt, 60 orang	100%
	Peningkatan usaha KSP/USP Koperasi	Terlaksananya Bimtek peningkatan usaha KSP/USP koperasi	105 orang	105 orang	100%
		Terlaksananya studi tiru pelaporan simpan pinjam oleh koperasi ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	4 orang	4 orang	100%
	Peningkatan kapasitas usaha koperasi sektor pertanian dan perkebunan	Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Sektor Pertanian komoditi jagung di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Agam	32 org/kab/kota	32 org/kab/kota	100%
		Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Sektor Perternakan Sapi Integrasi dengan perkebunan sawit dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya	32 orang	32 orang	100%
	Peningkatan kapasitas usaha koperasi sektor peternakan dan perikanan	Terlaksananya Bimtek Pembinaan Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi sector peternakan dan perikanan	105 orang	105 orang	100%
	Pembinaan Usaha Sektor Riil koperasi menuju kemitraan usaha	Bimtek Pembinaan Usaha Sektor Riil Koperasi Menuju Kemitraan	Kabupaten Solok Selatan Komoditi Kopi, Kabupaten Limapuluh Kota peternakan sapi dan Kabupaten Pasaman Barat peternakan sapi	Kabupaten Solok Selatan Komoditi Kopi, Kabupaten Limapuluh Kota peternakan sapi dan Kabupaten Pasaman Barat peternakan sapi	100%

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi (Capaian)	Persentase Capaian	
	Pembinaan Usaha Koperasi Melalui Gerakan Masyarakat	Terlaksananya Partisipasi pada Harkopnas Expo ke-72	2 koperasi	2 koperasi	100%	
		Terlaksananya Peringatan Acara Puncak Hari Koperasi ke-72 Tingkat Provinsi	700 orang	700 orang	100%	
	Peningkatan Usaha Koperasi yang Mengelola Produk Unggulan daerah	Terlaksananya bimtek bagi pengelola PUD dengan pendekatan OVOP melalui koperasi	120 orang	120 orang	100%	
		Terlaksananya Temu Usaha Koperasi Pengelola PUD dengan Pendekatan OVOP	60 orang	60 orang	100%	
	Peningkatan Permodalan Koperasi	Terlaksananya Bimtek Peningkatan Permodalan Koperasi di Kab. Agam, Kab. Tanah datar, Kab. Lima Puluh Kota	35 orang/kab/kota	35 orang/kab/kota	100%	
	Peningkatan Peran Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pola Syariah	Bimbingan teknis peningkatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pola Syariah	35 orang/kab/kota	35 orang/kab/kota	100%	
	Pelatihan Dewan Syariah Bagi KSPPS/USPPS	Terlaksananya pelatihan Dewan Syariah Bagi KSPPS/USPPS Koperasi	59 orang, 2 akt	59 orang, 2 akt	100%	
	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Koperasi Jasa Keuangan Bagi Pengurus /Pengawas/Pengelola (DAK)	Terlaksananya pelatihan Sertifikasi Kompetensi Koperasi Jasa Keuangan Bagi Pengurus /Pengawas/Pengelola	1 akt, 30 orang	1 akt, 30 orang	100%	
PROGRAM PENINGKATAN DAN	Pengembangan UMKM Kerajinan Unggulan Sumatera Barat	Bimtek Pengembangan Motif Sulam dan Tenun	60 orang	60 orang	100%	
		Bimtek Pengembangan Kreasi desain dan pewarnaan	60 orang	60 orang	100%	
		Sosialisasi pemasaran produk secara online	50 orang	50 orang	100%	
		Temu bisnis di Jakarta yang dilaksanakan bertepatan dengan Ivent Ina Craft 2019	3 MOU	3 MOU	100%	
		Temu bisnis di kota Medan yang dilaksanakan dalam rangkaian Event Sumatera Barat Expo	8 MOU	8 MOU	100%	
		Terlaksananya Promosi/pameran	Jakarta, Thailan, Malaysia	Jakarta, Thailan, Malaysia	100%	
		Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM Ke Perbankan Dan Lembaga Non Bank	Terlaksananya Sosialisasi Skim Kredit Pembiayaan UMKM ke Perbankan dan Lembaga Non Bank	150 orang	150 orang	100%
			Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Skim Kredit Pembiayaan/permodalan UMKM ke Perbankan dan Lembaga Non Bank	35 orang	35 orang	100%
		Pembuatan buku databased UKM unggulan Sumatera Barat	Jumlah buku data based UKM makanan dan minuman unggulan	250 buku	250 buku	100%
		Pelatihan kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM	Terlaksananya pelatihan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM	530 orang	530 orang	100%
		Peningkatan kapasitas kewirausahaan	Terlaksananya Bimtek	60 orang	60 orang	100%
			Terlaksananya peninjauan pemasaran produk UMKM unggulan Sumatera Barat ke Provinsi Riau	4 UKM	4 UKM	100%

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi (Capaian)	Persentase Capaian
	Pengadaan sarana dan prasarana PLUT	Tersedianya sarana dan prasarana PLUT KUKM	lemari panjang 2 unit, AC 9 unit, computer 2 nit, notebook 1 unit, meja kerja pejabat 2 unit, Meja kerja rapat 10 unit, kursi rapat, 38 buah, infokus 1 unit	lemari panjang 2 unit, AC 9 unit, computer 2 nit, notebook 1 unit, meja kerja pejabat 2 unit, Meja kerja rapat 10 unit, kursi rapat, 38 buah, infokus 1 unit	100%
	Perkuatan produk UMKM	Terlaksananya bimtek peningkatan kualitas kemasan label dan paper bag produk	120 orang	120 orang	100%
		Penyerahan prototip Kemasan Label dan Paper Bag	50 UKM	50 UKM	100%
	Peningkatan Gerakan Terpadu Persejahteraan UMKM	Promosi/Gelar Produk Unggulan binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat	70 UKM	70 UKM	100%
		Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah se Sumatera Barat	55 UKM	55 UKM	100%
		Bimtek Kurasi Produk UKM Unggulan Sumatera Barat Dalam rangka pengembangan	120 UKM	120 UKM	100%
	Partisipasi promosi produk UMKM	Pameran Indonesian Handycraft dengan tema "Jakarta Enjoyable multicultural diversities"	2 UKM	2 UKM	100%
		Bazar Ramadhan	120 UKM	120 UKM	100%
		Pameran dan Bazar dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK ke 47 tahun 2019	3 UKM	3 UKM	100%
		Terlaksananya Pawai Alegoris	2 UKM	2 UKM	100%
		Terlaksananya pameran Sumatera Barat EXPO 2019	2 UKM	2 UKM	100%
	Sosialisasi Pendaftaran Merek dan Sertifikat Halal dan PIRT	Sosialisasi tentang pendaftaran merk dan sertifikat halal	25 UKM	25 UKM	100%
		Identifikasi UKM yang akan diusulkan pendaftaran merk dan halal	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100%
	Pelatihan Teknik Penyusunan Proposal Bagi Pelaku UKM (DAK)	Terlaksananya Pelatihan Teknik Penyusunan Proposal bagi Pelaku UMKM	1 akt, 30 orang	1 akt, 30 orang	100%
	Pelatihan Kewirausahaan Bagi UKM di Daerah Pesisir (DAK)	Terlaksananya pelatihan Kewirausahaan bagi Koperasi didaerah pesisir	530 orang	530 orang	100%
	Pelatihan Pengembangan Usaha Bagi UKM di Kawasan Wisata (DAK)	Terlaksananya pelatihan pengembangan usaha bagi UMKM	150 orang	150 orang	100%
	Pelatihan Kewirausahaan Dalam Pengembangan Produk Unggul Bagi UMKM (DAK)	Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan dalam pengembangan produk Unggulan bagi UMKM	1 akt, 50 orang	1 akt, 50 orang	100%
	Pelatihan Pengembangan Usaha dan Inovasi Pangan Berbasis Umi-Umbian dan Sagu (DAK)	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan usaha dan inovasi pangan berbasis umbi-umbian dan Sagu	3 akt, 120 orang	3 akt, 120 orang	100%
	Monitoring ,Evaluasi dan Pembinaan Tenaga Pendamping (DAK)	Jumlah tenaga pendamping	23 orang	23 orang	100%

Uraian capaian Indikator Kinerja Utama sasaran meningkatnya kualitas koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja Presentase Peningkatan Nilai Asset Koperasi

Indikator Kinerja Presentase Peningkatan Nilai Asset Koperasi dengan target 9,5% tercapai 9,55% atau dengan capaian sebesar 100,53% (kategori sangat baik). Capaian tersebut diatas didapat dari :

$$\frac{\text{Rp. 5.225.355.660.000} - \text{Rp. 4.769.705.690.000}}{\text{Rp. 4.769.705.690.000}} \times 100\% = 9,55\%$$

Pada tahun 2018 nilai asset koperasi di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 4.769.705.690.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. Rp. 455.649.980.000 sehingga pada tahun 2019 nilai asset koperasi menjadi Rp. 5.225.355.670.000,-.

Peningkatan nilai asset koperasi ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- a) Banyaknya anggota koperasi KPN yang beranggotakan guru-guru melunasi hutangnya karena adanya kebijakan pemerintah untuk pembayaran tunjangan sertifikasi bagi guru. Hal ini menyebabkan modal sendiri koperasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
- b) Anggota koperasi banyak yang tidak mengajukan pinjaman koperasi sehingga tidak adanya perputaran modal koperasi yang berdampak kepada peningkatan asset koperasi.
- c) Rendahnya minat koperasi untuk mengembangkan usaha selain usaha Simpan Pinjam misalnya usaha sector riil sehingga modal koperasi mengendap di koperasi.
- d) Meningkatnya simpanan/tabungan anggota khususnya pada koperasi pegawai negeri

Tabel 32
Perkembangan Nilai Asset Koperasi pada Kab/Kota
Tahun 2017 – 2018

No	Kab/Kota	Nilai Asset (Rp. Juta)	
		2018	2019
1	Kota Padang	1.432.813,94	1.706.565,98
2	Kab. Agam	448.153,97	464.624,93
3	Kab. Tanah Datar	322.708,71	348.382,84
4	Kab. Dharmasraya	267.673,52	321.057,47
5	Kab. Lima Puluh Kota	272.273,26	281.833,83

Dari tabel 32 diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten/Kota tersebut diatas merupakan 5 (lima) Kabupaten/Kota penyumbang nilai asset terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Koperasi yang ada pada kabupate/kota tersebut pada umumnya adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) yang beranggotakan guru-guru.

Disamping itu peningkatan nilai asset koperasi juga disebabkan karena capaian program kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat cukup baik. Capaian dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- (1) Melakukan pembinaan kepada koperasi di kabupaten/kota untuk meningkatkan modal sendiri koperasi misalnya menambah simpanan wajib, meningkatkan tabungan anggota serta simpanan lainnya.
- (2) Melakukan bimtek penilaian kesehatan simpan pinjam koperasi untuk meningkatkan kesehatan modal koperasi.
- (3) Melakukan uji petik pengawasan koperasi untuk melihat rasio perkembangan modal koperasi
- (4) Melakukan Bimtek peningkatan permodalan koperasi melalui peningkatan akses permodalan kepada lembaga perbankan/non perbankan

Tabel 33
Rekapitulasi Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi
Provinsi Sumatera Bart
Tahun 2018 – 2019

No	Bentuk Pengawasan Koperasi Kab/Kota	Jumlah Koperasi	
		2018	2019
1	Uji Petik Pengawasan	113	127
2	Penilaian Kesehatan	690	671

Pada tabel 33 diatas terlihat bahwa Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya peningkatan asset koperasi baik melalui pengawasan maupun penilaian kesehatan koperasi. Dari pengawasan yang dilakukan ini kedepanya diharapkan : 1) terwujudnya penigkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan; 2) terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh; 3) terwujudnya koperasi yang akuntabel

2) Indikator Kinerja Presentase Peningkatan Nilai Omset Koperasi

Indikator Kinerja Presentase Peningkatan Nilai Omset Koperasi dengan target 8,5% tercapai 8,55% atau dengan capaian sebesar 100,59% (kategori sangat baik). Capaian tersebut diatas didapat dari :

$$\frac{\text{Rp. 6.251.205.310.000} - \text{Rp. 5.758.772.680.000}}{\text{Rp.5.758.772.680.000}} \times 100\% = 8,55\%$$

Pada tahun 2018 nilai omset koperasi di Sumatera Barat sebesar Rp. 5.758.772.680.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. Rp. 492.432.640.000 sehingga pada tahun 2019 nilai omset koperasi menjadi Rp. 6.251.205.320.000,-.

Tabel 34
Perkembangan Nilai Omset Koperasi pada Kab/Kota
Tahun 2018 – 2019

No	Kab/Kota	Nilai Omset (Rp. Juta)	
		2018	2019
1	Kota Padang	2.120.538,49	2.728.042,63
2	Kab. Agam	329.131,11	444.201,43
3	Kab. Dharmasraya	218.397,15	354.724,15
4	Kota Bukittinggi	202.970,43	343.348,94
5	Kab. Tanah Datar	312.512,34	308.843,64

Pada tabel 34 diatas dapat terlihat bahwa 2 kabupaten/kota penyumbang omset tertinggi di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan omset yang cukup signifikan terutama Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kab. Agam, dan Kab. Dharmasraya, sedangkan Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan asset. Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan karena banyaknya KPN yang beranggotakan guru-guru melunasi angsuran pinjamannya.

Secara umum target indicator ini tercapai dengan kategori sangat baik disebabkan adanya peningkatan volume usaha simpan pinjam konvensional maupun usaha simpan pinjam pembiayaan syariah dan peningkatan volume usaha sektor riil. Peningkatan volume usaha simpan pinjam konvensional maupun pembiayaan syariah disebabkan meningkatnya permodalan koperasi dalam memberikan pembiayaan bagi anggota baik modal yang bersumber dari modal sendiri maupun modal pinjaman yang bersumber dari anggota, koperasi lain/anggotanya, bank, lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang. Sedangkan peningkatan volume usaha sektor riil disebabkan koordinasi yang baik antara Dinas koperasi dan UKM Provinsi/Kab/Kota dengan OPD terkait lainnya dalam peningkatan

volume usaha koperasi yang mengelola usaha di sektor pertanian seperti : jagung dan beras, sektor perkebunan seperti : kopi, kelapa sawit, tebu, minyak atsiri, sektor peternakan seperti : sapi dan ayam, sektor perikanan seperti : ikan budidaya darat dan ikan laut, usaha ritel dan usaha dibidang jasa pengangkutan serta jasa lainnya.

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 melakukan beberapa bentuk program kegiatan untuk peningkatan nilai omset koperasi ini, seperti :

- (1) Melakukan bimbingan teknis peningkatan kapasitas usaha koperasi sektor pertanian, perkebunan
- (2) Melakukan bimbingan teknis peningkatan kapasitas usaha koperasi sektor peternakan, perikanan
- (3) Pembinaan terhadap koperasi pengelola produk unggulan daerah
- (4) Bimtek peningkatan usaha koperasi pola syariah kepada pengurus/pengelola koperasi
- (5) Melakukan percepatan pengembangan koperasi pola syariah melalui kegiatan konsultasi ke koperasi dan penerapan system akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis IT.
- (6) Melakukan bimtek peningkatan peran KSP/USP dalam pembiayaan kepada anggota.

3) Indikator Kinerja Presentase Koperasi Aktif

Indikator Kinerja Presentase Koperasi Aktif dengan target 78% tercapai 78,03% atau dengan capaian sebesar 100,04% (kategori sangat baik). Capaian tersebut diatas didapat dari :

$$\frac{2.969}{3.805} \times 100\% = 78,03\%$$

Jumlah koperasi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 sebanyak 3.805 unit yang terdiri atas koperasi aktif sebanyak 2.969 unit dan koperasi tidak aktif sebanyak 836 unit.

Tabel 35
Perkembangan Jumlah Koperasi
Tahun 2018 – 2019

No	Tahun	Jumlah Koperasi		Total
		Aktif	Tidak Aktif	
1	2019	2.969	836	3.805
2	2018	2.815	809	3.624

Pada tabel 35 diatas dapat terlihat bahwa jumlah koperasi di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 jumlah koperasi sebanyak 3.624 unit meningkat sebanyak 181 unit pada tahun 2019 menjadi 3.805 unit. Peningkatan jumlah koperasi ini juga diikuti dengan jumlah koperasi aktif yaitu pada tahun 2018 jumlah koperasi aktif sebanyak 2.815 unit, tahun 2019 jumlah koperasi aktif sebanyak 2.969 unit.

Tabel 36
Jumlah Koperasi per Kab/Kota
Tahun 2019

No	Provinsi/Kab/Kota	Jumlah Koperasi		Total	% Koperasi aktif
		Aktif	Tidak Aktif		
1	Provinsi	84	30	114	73,68
2	Kab. Agam	197	24	221	89,14
3	Kab. Pasaman	82	77	159	51,57
4	Kab. Pasaman Barat	412	13	425	96,94
5	Kab. Lima Puluh Kota	162	50	212	76,42
6	Kab. Solok	89	40	129	68,99
7	Kab. Solok Selatan	73	40	113	64,60
8	Kab. Pdg Pariaman	113	106	219	51,60
9	Kab. Pesisir Selatan	207	102	309	67

10	Kab. Tanah Datar	205	19	224	91,52
11	Kab. Sijunjung	73	84	157	46,50
12	Kab. Dharmasraya	94	110	204	46,08
13	Kab. Mentawai	27	58	85	31,77
14	Kota Bukittinggi	88	5	93	94,62
15	Kota Padang	689	33	722	95,43
16	Kota Sawahlunto	60	8	68	88,24
17	Kota Padang Panjang	59	2	61	96,72
18	Kota Solok	45	14	59	76,27
19	Kota Payakumbuh	136	11	147	92,52
20	Kota Pariaman	73	11	84	86,90
	Jumlah	2.969	836	3.805	78,03

Pada tabel 36 dapat dilihat bahwa 10 kabupaten/kota realisasi persentase jumlah koperasi aktifnya diatas capaian provinsi, 9 kabupaten/kota realisasinya dibawah realisasi provinsi. Hal ini menunjukkan secara umum persentase koperasi aktif di provinsi Sumatera Barat cukup baik.

Meningkatnya jumlah koperasi aktif ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu : Pembinaan Koperasi Tidak Aktif, Revitalisasi Kelembagaan Koperasi, Pelatihan, Pembinaan Kelembagaan Koperasi, Pengawasan Usaha dan Kelembagaan Koperasi dan Pelatihan Akuntansi bagi Pengurus/Pengelola Koperasi.

Disamping dalam rangka meningkatkan jumlah koperasi aktif Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui anggaran dekonsentrasi menempatkan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) sebanyak 20 orang yang ditempatkan di 9 kabupaten/kota, yaitu Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kab. Padang Pariaman, dan Kab. Mentawai.

4) Indikator Kinerja Jumlah Produk UKM yang terstandarisasi

Indikator Kinerja Jumlah produk UKM yang terstandarisasi dengan target 40 UKM terealisasi 45 UKM atau dengan capaian sebesar 112,5% (kategori sangat baik). Capaian tersebut diatas didapat dari jumlah produk UKM yang mendapat fasilitasi pendaftaran merk sebanyak 25 UKM dan sertifikat halal sebanyak 20 UKM

Tahun 2017 jumlah UKM binaan adalah sebanyak 812 UKM dengan jumlah UKM yang meningkat skala usahanya dari usaha kecil menjadi usaha menengah adalah 30 UKM. Pada tahun 2018 jumlah UKM binaan yang meningkat skala usahanya dari usaha kecil ke usaha menengah adalah 45 UKM.

Tabel 37
Data UKM Binaan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat
Yang Mendapatkan Sertifikat Halal dan Merk Tahun 2019

No	Nama Usaha/UKM	Kab/Kota	Ket
1	Linda Kusuma Catering	Kota Padang	Sertifikat Halal
2	Naura Kitchen	Kota Padang	Sertifikat Halal
3	Camel Cake And Bakery	Kota Padang	Sertifikat Halal
4	Ladies Cake	Kota Padang	Sertifikat Halal
5	Garam Cair Pasifik	Kota Padang	Sertifikat Halal
6	Keripik Balado Mas Rahim	Kota Padang	Sertifikat Halal
7	Randang Hana	Kota Padang	Sertifikat Halal
8	Pekyek Purnama	Kota Padang	Sertifikat Halal
9	Rakik Maco Indah	Kota Padang	Sertifikat Halal
10	Azura	Kota Padang	Sertifikat Halal

11	Taci	Kota Padang	Sertifikat Halal
12	Rendang Mala	Kota Payakumbuh	Sertifikat Halal
13	Dapur Wosugi	Kota Payakumbuh	Sertifikat Halal
14	Kacang Mak Ida	Kab Solok	Sertifikat Halal
15	Donat Tri Putri	Kab Solok	Sertifikat Halal
16	Puti Sikumbang	Kab Limapuluh Kota	Sertifikat Halal
17	Kue Sapik Demona	Kab Agam	Sertifikat Halal
18	Al Vino	Kab Agam	Sertifikat Halal
19	Ikan Bilih Cheche	Kab Tanah Datar	Sertifikat Halal
20	Eva Cake & Cookies	Kab Sijunjung	Sertifikat Halal
21	Nursalmiati	Kota Pariaman	Pendaftaran Merk
22	Rosma KH	Kota Pariaman	Pendaftaran Merk
23	Nofrida Busri	Kota Pariaman	Pendaftaran Merk
24	Fatma Enggriani	Kab.Pesisir Selatan	Pendaftaran Merk
25	Nofriyanti	Kota Padang Panjang	Pendaftaran Merk
26	Hartati	Kab. Padang Pariaman	Pendaftaran Merk
27	Quratul Ayuni,S.Ds	Kab. Padang Pariaman	Pendaftaran Merk
28	Yusrizal	Kab. Solok	Pendaftaran Merk
29	Zarti dewita	Kab. Solok	Pendaftaran Merk
30	Gusneli Fiyanti	Kab. Agam	Pendaftaran Merk

31	Nurtri Warnis	Kota Payakumbuh	Pendaftaran Merk
32	Ina Yatul Kubra	Kab. Tanah Datar	Pendaftaran Merk
33	Yetri Elvi Sovia	Kab. Pasaman Barat	Pendaftaran Merk
34	Riri Anggraini	Kota Padang	Pendaftaran Merk
35	Marta Yenti	Kota Bukittinggi	Pendaftaran Merk
36	Kartini	Kota Solok	Pendaftaran Merk
37	Rosmayulis	Kota Bukittinggi	Pendaftaran Merk
38	Patriyanti Astuti	Kab. Padang Pariaman	Pendaftaran Merk
39	Rendra Jendro Anevi	Kab. Solok Selatan	Pendaftaran Merk
40	Karnila	Kab. Solok Selatan	Pendaftaran Merk
41	Afniyenti	Kab. Lima Puluh kota	Pendaftaran Merk
42	Greatia Martha	Kota Padang	Pendaftaran Merk
43	Roza Fitria, S.Pd	Kota Padang	Pendaftaran Merk
44	Dessy Andriani	Kota Padang Panjang	Pendaftaran Merk
45	Supriyanto	Kab. Solok Selatan	Pendaftaran Merk

Dari tabel 37 diatas dapat dilihat UKM binaan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan bantuan standarisasi produk berupa sertifikat halal pada umumnya adalah yang bergerak pada bidang usaha makanan dan bordir.

Peningkatan realisasi dari target yang ditetapkan disebabkan karena: 1) Dalam rangka melindungi produk UKM dari pemalsuan produk maka pemerintah provinsi menambah alokasi anggaran untuk pendaftaran merk, 2) Semakin meningkatnya kebutuhan UKM dalam meningkatkan kualitas dan mutu produk 3) Wisata provinsi Sumatera Barat terkenal dengan wisata halalnya sehingga perlu sekali ditingkatkan jumlah produk yang bersertifikat halal.

II. Meningkatkan Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil evaluasi Tim KemenPAN dan RB terhadap Sakip Provinsi Sumatera Barat terdapat perubahan pada indikator tujuan sehingga tujuan "Meningkatnya Kinerja Organisasi" dicapai dengan menetapkan sasaran strategis "Meningkatnya tata kelola organisasi" yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Tujuan, sasaran dan indikator dapat dilihat pada gambar berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> •Meningkatnya kinerja organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> •Meningkatnya tata kelola organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> •Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Gambar 6 : Tujuan dan Sasaran Strategis II

Tujuan "Meningkatnya Kinerja Organisasi" adalah hasil kerja dari organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya baik SDM maupun keuangan serta pelaksanaan kebijakan, termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berupa laporan pelaksanaan (Laporan Kinerja) setiap tahun.

Tujuan ini dapat dicapai dengan "Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat". Pencapaian kinerja sasaran "Meningkatnya Tata Kelola Organisasi" tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 43

Tabel 38.
Capain Kinerja Tahun 2019

Sasaran Stretegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	kategori	BB	B	95,36%
Rata-rata capaian Sasaran 2					95,36%

Berdasarkan Tabel 38 di atas dapat kami jelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi pada tahun 2019 berhasil dicapai. Rata-rata capaian sasaran adalah 95,36% dan termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 95,36% adalah tata kelola organisasi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat telah mencapai tata kelola organisasi yang maksimal karena masih dalam kategori sangat baik.

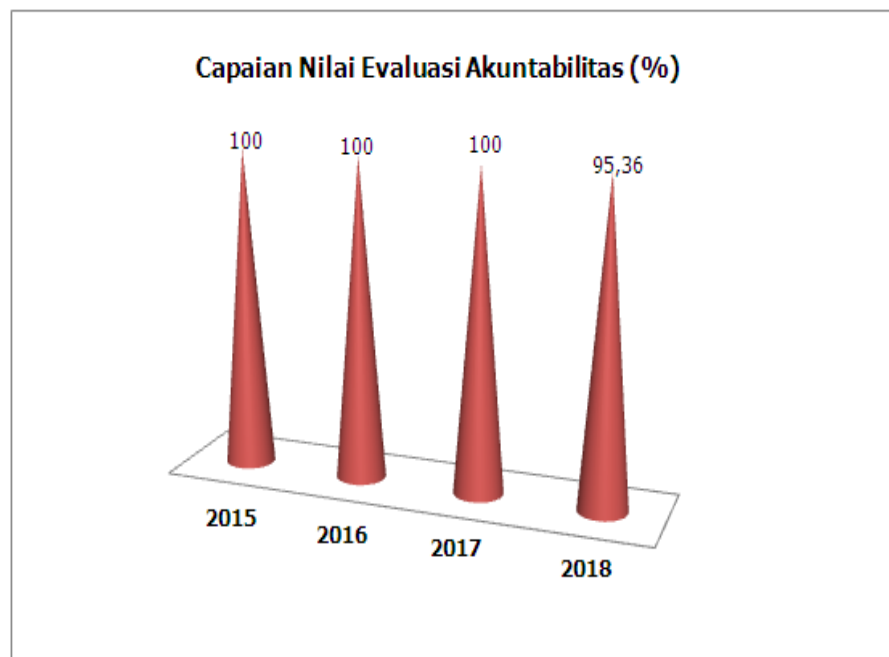
Tabel 39.
Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2018 dan Tahun 2019

Sasaran Stretegis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi	
			2018	2017
Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	B	B

Dari Tabel 39 dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja" tahun 2019 sama

nilainya dengan capaian kinerja pada tahun 2018, yaitu B. Untuk indikator kinerja.

Capaian kinerja secara keseluruhan merupakan gabungan dari realisasi seluruh proses tata kelola organisasi yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran. Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 7



Gambar 7. Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas (%) Tahun 2015 s.d Tahun 2018

Tabel 40.

Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi sampai Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	B	95,36%

Tabel 40 memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja "Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja" pada tahun 2018 belum memenuhi target akhir RPJMD dan atau Renstra yaitu baru mencapai 95,36%. Dinas Koperasi, UKM akan berusaha untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja ini akan menjadi perhatian Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah untuk pembangunan sektor koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera Barat, sehingga kedepannya dapat lebih memperhatikan tingkat kemajuan hasil capaian.

Tabel 41.
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Sumsel

Sasaran Stretegis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018		Ket
		Sumbar	Sumsel	
Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B	B	Sama

Dari Tabel 41 dapat dilihat bahwa capaian indikator "Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja" Provinsi Sumatera Barat sama dibandingkan Provinsi Sumatera Selatan. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja B artinya kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 sudah baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kerja yang handal. Indikator kinerja "persentase capaian realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan" dan indikator kinerja persentase capaian realisasi keuangan pelaksanaan program/kegiatan Provinsi Sumatera Barat lebih rendah dari Provinsi Jambi.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui 5 program yang terdiri atas 27 kegiatan, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (APBD) yang terdiri atas 11 (sebelas) kegiatan yaitu:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor
 - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - h. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah
 - j. Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi
 - k. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri atas sepuluh kegiatan yaitu:
 - a. Pengadaan Mubelair
 - b. Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala meubiler
 - g. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD
 - h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
 - i. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - j. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari satu kegiatan yaitu:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
-

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri atas satu kegiatan yaitu:
 - a. Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri atas tiga kegiatan yaitu:
 - a. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
 - b. Penatausahaan Keuangan SKPD
 - c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Seluruh kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kerjanya sangat baik. Realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan secara lengkap dapat dilihat dari Tabel 42.

Tabel 42.
Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis II Tahun 2019

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi (Capaian)	Persentase Capaian
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya surat dan paket	1500 surat, 150 paket	1500 surat, 150 paket	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi dan sumber daya air	12 bln, 3 gedung	12 bln, 3 gedung	100%
	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Tersedianya jasa kemersihan, pengaman dan sopir kantor	12 bln	12 bln	100%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	12 bln	12 bln	100%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan adm kantor	12 bln	12 bln	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bln	12 bln	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 bln	12 bln	100%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bln	12 bln	100%
	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Tersedianya jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	12 bln	12 bln	100%
	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terbinya mental dan fisik aparatur	Senam 24 kali, pembaca alqur'an 24 kali, ceramah agama 24 kali	Senam 24 kali, pembaca alqur'an 20 kali, ceramah agama 20 kali	85%
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	1200 kotak	1200 kotak	100%	

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi (Capaian)	Persentase Capaian
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mobiler kantor	4 unit	4 unit	100%
	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya komputer 2 bh, printer 2 bh dan laptop 1 bh			100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor	2 Gedung	2 Gedung	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Mobil 4 unit, motor 10 unit	Mobil 4 unit, motor 10 unit	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan/perlengkapan kantor	15 unit	15 unit	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mobiler kantor	64 unit	64 unit	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Terpeliharanya Instalasi dan Jaringan	2 Gedung	2 Gedung	100%
	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan/perlengkapan kantor	4 unit	4 unit	100%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya	75 stel	75 stel	100%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terikutinya bimtek bagi aparatur	6 orang	6 orang	100%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya perencanaan dan penganggaran SKPD	6 dok, 1 lap	6 dok, 1 lap	100%
	Penatausahaan Keuangan SKPD	Tersedianya jasca pendukung administrasi keuangan perkantoran	12 bln	12 bln	100%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD	5 jenis laporan	5 jenis laporan	100%
	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Meningkatnya pengawasan asset	3 dokumen	3 dokumen	100%

Uraian capaian IKU sasaran strategis "Meningkatnya Tata Kelola Organisasi" adalah sebagai berikut:

1. Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja" memiliki target BB, terealisasi B dengan tingkat capaian 95,36% termasuk kategori keberhasilan Baik. Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, seperti terlihat pada Tabel 48 di atas.

Indikator Kinerja Utama "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja" diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018. Nilai Akuntabilitas pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat kategori B dengan interpretasi baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan penilaian, yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan Tujuan dan Sasaran yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Rencana tata kelola harus mengandung visi dan misi yang jelas, sebagai acuan untuk menyusun tujuan dan sasaran tata kelola.
2. Struktur kelembagaan yang solid untuk mendorong terwujudnya sistem manajemen yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Penetapan kebijakan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan organisasi, tertulis, dan transparan.
4. Perencanaan yang realistis, terinci dan sesuai dengan kebutuhan, transparan dan partisipatif, akomodatif terhadap sosial budaya masyarakatsekitar hutan, dan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
5. Penetapan prosedur kerja yang tepat dan jelas, mudah dilaksanakan, mudah dimengerti dan transparan, serta mempertimbangkan peraturan perundangan yang terkait
6. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, professional, dan bermoral.
7. Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, tertib administrasi, transparan, baik dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan

keuangan, pengelolaan aset daerah, dan pengelolaan barang inventaris.

8. Sistem pencatatan yang jelas, akurat, dan sederhana.

Laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) tata kelola akan mengacu pada prinsip-prinsip objektivitas, transparansi, akurasi yang tinggi, serta profesionalisme yang dapat diandalkan.

Penerapan prinsip transparansi dimaksudkan agar data/informasi kegiatan tata kelola pemerintahan termasuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerja organisasi dapat diakses oleh publik.

Prinsip partisipasi dimaksudkan agar publik dapat berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam pengambilan keputusan tata kelola, baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya.

Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dalam menyampaikan pendapat demi keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran tata kelola pemerintah yang baik dan berkelanjutan sebagaimana yang dilakukan oleh melalui mekanisme PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Melalui PPID, masyarakat diberikan akses untuk mengetahui informasi dan dokumentasi yang terdapat pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

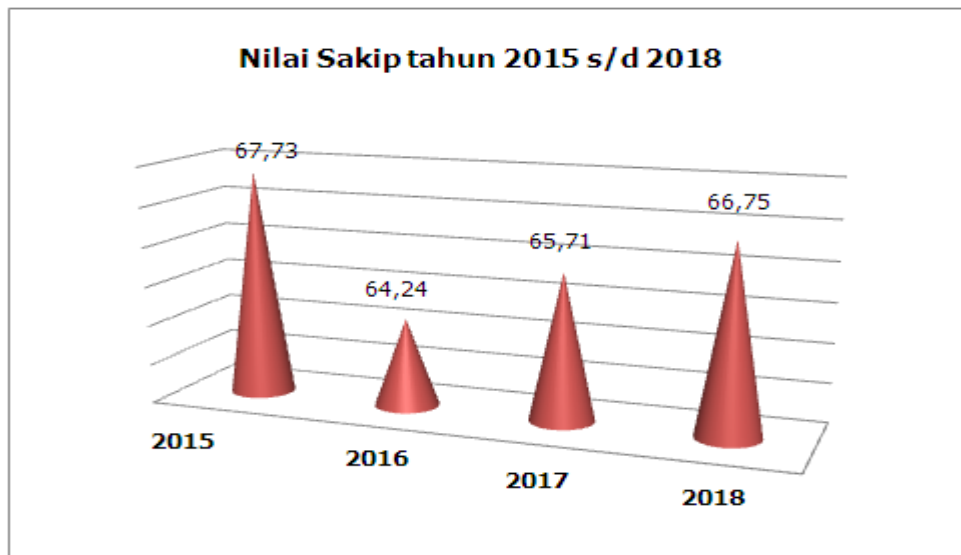
Rekapitulasi hasil evaluasi akuntabilitas Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera dari awal tahun pelaksanaan Renstra dapat dilihat pada Tabel 48.

Tabel 43.
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat 2015-2018

Tahun	Perencanaan Kinerja (35%)	Pengukuran Kinerja (20%)	Pelaporan (15%)	Evaluasi Kinerja (10%)	Pencapaian Sasaran (20%)	Hasil Evaluasi	Nilai
2015	23,60	15,83	11,47	6,03	10,80	67,73	B
2016	23,71	15,49	9,13	6,16	9,75	64,24	B
2017	23,45	15,10	10,52	6,16	10,75	65,71	B
2018	22,47	16,77	10,78	6,19	10,54	66,75	B

Dari Tabel 43 di atas terlihat, sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat telah mendapatkan nilai B pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun nilai hasil evaluasi mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017 meningkat kembali. Adanya penurunan ini disebabkan karena adanya peningkatan dalam aspek penilaian. Pada tahun 2018 Dinas Koperasi, UKM berupaya untuk meningkatkan nilai indikator kinerja "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja" sehingga pada tahun 2018 hasil evaluasi mengalami peningkatan yang cukup baik.

Pencapaian nilai SAKIP pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 – 2018 dapat dilihat dalam Gambar 9.



Gambar 8. Pencapaian Nilai SAKIP Empat Tahun Terakhir

Dari Gambar 8 di atas dapat dijabarkan bahwa nilai SAKIP Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dalam tiga tahun terakhir sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, namun perlu ditingkatkan agar tata kelola organisasi pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat menjadi sebuah sistem dengan pengendalian langsung pada sistem manajemen kerjanya untuk meminimalkan kesalahan manusia (*human error*). Dengan tata kelola organisasi yang baik, diharapkan dapat mempermudah sistem kerja organisasi

untuk mencapai tujuan organisasi. Aplikasi *e-budgeting* yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga merupakan inovasi yang meningkatkan Sistem Akuntabilitas pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja padatahun 2019 sebagaimana Tabel 44.

Tabel 44.

Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO URUT	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI			Sisa Anggaran
			FISIK (%)	KEUANGAN		
				Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA LANGSUNG	16,253,281,359	99,57	15,097,296,338	92.89	1,099,759,771
	BELANJA LANGSUNG POKOK	4,890,206,305	99,14	4,640,838,231	94.90	193,142,824
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2,213,185,515	96,82	2,100,914,218	94.93	112,271,297
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14,400,000	100.00	13,480,557	93.61	919,443
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	560,046,950	100.00	496,936,059	88.73	63,110,891
3	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	868,858,870	100.00	863,190,878	99.35	5,667,992
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30,547,345	100.00	30,529,100	99.94	18,245

NO URUT	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI			Sisa Anggaran Rp
			FISIK (%)	KEUANGAN		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	28,762,200	100.00	28,648,400	99.60	113,800
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,501,350	100.00	20,404,000	99.53	97,350
7	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	16,440,000	100.00	15,240,000	92.70	1,200,000
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	485,293,800	100.00	466,465,724	96.12	18,828,076
9	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	151,035,000	100.00	137,987,000	91.36	13,048,000
10	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	6,100,000	80.00	3,800,000	62.30	2,300,000
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	31,200,000	85.00	24,232,500	77.67	6,967,500
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2,055,619,090	98,89	1,949,417,063	94.83	64,202,027
12	Pengadaan Mebeleur	200,000,000	90.00	158,460,000	79.23	41,540,000
13	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	42,000,000	100.00	41,522,800	98.86	477,200
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	460,000,000	100.00	457,355,000	99.43	2,645,000
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	205,169,090	100.00	192,576,263	93.86	12,592,827
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	20,450,000	100.00	16,826,000	82.28	3,624,000
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	10,000,000	100.00	9,750,000	97.50	250,000
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	10,000,000	100.00	9,943,000	99.43	57,000
19	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	196,000,000	100.00	192,984,000	98.46	3,016,000
20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	912,000,000	100.00	870,000,000	95.39	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	53,250,000	100.00	52,895,000	99.33	355,000
20	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	53,250,000	100.00	52,895,000	99.33	355,000
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	43,216,000	100.00	38,233,400	88.47	4,982,600
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43,216,000	100.00	38,233,400	88.47	4,982,600
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	524,935,700	100.00	499,378,550	95.13	11,331,900
22	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	111,441,200	100.00	100,642,300	90.31	10,798,900
23	Penatausahaan Keuangan SKPD	218,524,000	100.00	217,991,000	99.76	533,000
24	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	79,531,500	100.00	73,306,400	92.17	6,225,100
25	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	115,439,000	100.00	107,438,850	93.07	8,000,150

NO URUT	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI			Sisa Anggaran Rp
			FISIK (%)	KEUANGAN		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA LANGSUNG URUSAN	11,363,075,057	100.00	10,456,458,112	92.02	906,616,954
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	3,105,455,404	100.00	2,911,357,620	93.75	194,097,784
26	Pengembangan dan Peningkatan Data dan Informasi	68,894,500	100.00	63,084,200	91.57	5,810,300
27	Pembinaan Kelembagaan Koperasi	312,029,600	100.00	286,226,400	91.73	25,803,200
28	Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award	128,962,250	100.00	128,386,410	99.55	575,840
29	Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	52,951,500	100.00	52,211,000	98.60	740,500
30	Pembenahan Koperasi Tidak Aktif	55,044,700	100.00	53,385,600	96.99	1,659,100
31	Sosialisasi dan Peningkatan Peran Koperasi dalam Pengembangan kelompok usaha Strategis	176,034,620	100.00	169,852,900	96.49	6,181,720
32	Familirization Trip berbasis koperasi	36,561,950	100.00	31,629,810	86.51	4,932,140
33	Penyusunan Ranperda Pembangunan dan Pengembangan Koperasi dan UKM	207,007,100	100.00	204,322,300	98.70	2,684,800
34	Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi bagi pejabat pengawas koperasi	71,834,000	100.00	69,243,250	96.39	2,590,750
35	Peningkatan pelayanan Mess UPTD	400,160,184	100.00	397,498,740	99.33	2,661,444
36	Sosialisasi Perkoperasian Dilokasi TMMD/N	32,190,000	100.00	31,548,500	98.01	641,500
37	Pembinaan dan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	69,857,800	100.00	67,776,250	97.02	2,081,550
38	Reviu Penerapan dan Sanksi bagi Koperasi	182,952,000	100.00	178,047,980	97.32	4,904,020
39	Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	130,129,000	100.00	125,963,930	96.80	4,165,070
40	Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi	111,073,500	100.00	108,497,800	97.68	2,575,700
41	Pelatihan Penyusunan Bisnis Plan Bagi Koperasi (DAK)	184,467,100	100.00	172,271,950	93.39	12,195,150
42	Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi Bagi Pengurus Koperasi (DAK)	151,624,800	100.00	144,249,800	95.14	7,375,000
43	Pelatihan Akuntansi Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi (DAK)	203,443,400	100.00	186,308,400	91.58	17,135,000
44	Pelatihan Tata Cara Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Bagi Pengurus /Pengelola Koperasi (DAK)	150,674,000	100.00	141,504,000	93.91	9,170,000
45	Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi Bagi Pengurus Koperasi di Daerah Tertinggal (DAK)	205,468,400	100.00	180,561,800	87.88	24,906,600
46	Pelatihan Penguatan Pengawasan Bagi Pengurus/Pengawas Koperasi (DAK)	174,095,000	100.00	118,786,600	68.23	55,308,400
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING KOPERASI	1,736,090,153	100.00	1,584,841,787	91.29	151,248,375
47	Pelatihan SOM pengelolaan simpan pinjam pembiayaan syariah oleh koperasi bagi pengurus/pengelola	53,563,950	100.00	45,931,350	85.75	7,632,600

NO URUT	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI			Sisa Anggaran Rp
			FISIK (%)	KEUANGAN		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
48	Peningkatan usaha KSP/USP Koperasi	94,511,000	100.00	86,436,000	91.46	8,075,000
49	Peningkatan kapasitas usaha koperasi sektor pertanian dan perkebunan	85,097,100	100.00	78,473,709	92.22	6,623,391
50	Peningkatan kapasitas usaha koperasi sektor peternakan dan perikanan	91,532,300	100.00	85,139,700	93.02	6,392,600
51	Pembinaan Usaha Sektor Riil koperasi menuju kemitraan usaha	115,257,650	100.00	110,564,450	95.93	4,693,200
52	Pembinaan Usaha Koperasi Melalui Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)	242,645,200	100.00	238,859,800	98.44	3,785,400
53	Peningkatan Usaha Koperasi yang Mengelola Produk Unggulan daerah dengan Pendekatan OVOF	112,660,800	100.00	105,499,071	93.64	7,161,729
54	Peningkatan Permodalan Koperasi	59,167,800	100.00	57,772,400	97.64	1,395,400
55	Peningkatan Peran Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pola Syariah	223,732,650	100.00	202,053,852	90.31	21,678,798
56	Pelatihan Dewan Syariah Bagi KSPPS/USPPS Koperasi (DAK)	460,268,000	100.00	403,989,750	87.77	56,278,250
57	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Koperasi Jasa Keuangan Bagi Pengurus /Pengawas/Pengelola (DAK)	197,653,700	100.00	170,121,700	86.07	27,532,000
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SADIQ UMKM	6,521,529,500	100.00	5,960,258,705	91.39	561,270,795
58	Pengembangan UMKM Kerajinan Unggulan Sumatera Barat	1,062,582,700	100.00	917,679,876	86.36	144,902,824
59	Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM Ke Perbankan Dan Lembaga Non Bank	443,000,000	100.00	416,864,200	94.10	26,135,800
60	Pembuatan buku databased UKM unggulan Sumatera Barat	110,195,000	100.00	100,134,750	90.87	10,060,250
61	Pelatihan kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM	1,620,000,000	100.00	1,465,374,799	90.46	154,625,201
62	Peningkatan kapasitas kewirausahaan	111,611,700	100.00	101,759,950	91.17	9,851,750
63	Pengadaan sarana dan prasarana PLUT	325,782,000	100.00	315,714,940	96.91	10,067,060
64	Pengembangan Produk UKM Binaan Sumatera Barat	75,355,900	100.00	71,824,250	95.31	3,531,650
65	Perkuatan produk UMKM	146,712,600	100.00	143,993,200	98.15	2,719,400
66	Peningkatan Gerakan Terpadu Persejahteraan UMKM Sumatera Barat	76,307,000	100.00	75,185,000	98.53	1,122,000
67	Partisipasi promosi produk UMKM	308,690,000	100.00	294,279,440	95.33	14,410,560
68	Sosialisasi Pendaftaran Merek dan Sertifikat Halal dan PIRT	102,346,000	100.00	97,528,850	95.29	4,817,150
69	Pelatihan Teknik Penyusunan Proposal Bagi Pelaku UKM (DAK)	63,798,200	100.00	61,323,200	96.12	2,475,000
70	Pelatihan Kewirausahaan Bagi UKM di Daerah Pesisir (DAK)	209,550,400	100.00	191,660,300	91.46	17,890,100
71	Pelatihan Pengembangan Usaha Bagi UKM di Kawasan Wisata (DAK)	381,848,100	100.00	338,233,100	88.58	43,615,000
72	Pelatihan Kewirausahaan Dalam Pengembangan Produk Unggul Bagi UMKM (DAK)	130,282,700	100.00	96,182,700	73.83	34,100,000
73	Pelatihan Pengembangan Usaha dan Inovasi Pangan Berbasis Umbi-Umbian dan Sagu (DAK)	330,958,300	100.00	286,707,800	86.63	44,250,500
74	Monitoring ,Evaluasi dan Pembinaan Tenaga Pendamping (DAK)	1,022,508,900	100.00	985,812,350	96.41	36,696,550

Dari Tabel 51 diatas dapat dilihat bahwa serapan anggaran tahun 2019 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, DAK, APBN yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp.19.099.505.365,- yang terdiri atas:

- a. Anggaran Sumber Dana Alokasi Khusus: Rp. 3.696.640.000,-
- b. Anggaran Sumber Dana APBD: Rp. 16.253.281.365,-
- c. Anggaran Sumber Dana APBN: Rp. 2.846.224.000,-

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target kinerja diatas adalah sebesar Rp. 17.817.702.830,- atau 93,29%. Artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.1.281.802.535,- atau 6,71%. Efisiensi ini diiringi dengan efektifnya pencapaian target sasaran strategis dengan rata-rata sasaran sebesar 99,39% dengan kategori keberhasilan sangat baik.

Rincian serapan anggaran masing-masing sasaran adalah sebagaiberikut :

1. Meningkatnya kualitas Koperasi dan UKM

Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas koperasi dan UKM dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.890.206.305,- terealisasi sebesar Rp. 4.640.838.231 atau 94,90%. Apabila asumsi keberhasilan kinerja keuangan dinilai sekurang-kurangnya 95% dari dana yang dialokasikan terserap maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap belum sesuai dengan target penyerapan anggaran. Realisasi fisik semua kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis I ini secara keseluruhan 100%.

2. Meningkatnya tata kelola organisasi

Untuk pencapaian Sasaran Strategis ini anggaran sebesar Rp. 11.363.075.057,- terealisasi sebesar Rp. 10.456.458.112 atau 92,02%. Apabila asumsi keberhasilan kinerja keuangan dinilai sekurang-kurangnya 95% dari dana yang dialokasikan terserap maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap belum sesuai dengan target penyerapan anggaran. Realisasi fisik semua kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis I ini secara keseluruhan 99,14%.

Disamping anggaran diatas untuk menunjang tercapainya sasaran di atas juga didukung oleh belanja tidak langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja tambahan penghasilan pegawai, dan insentif pemungutan retribusi daerah sebesar Rp. 7.654.974.266,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.474.921.216,- atau sekitar 97,66%. Memperhatikan realisasi serapan anggaran pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh sebagaimana yang terdapat pada Tabel 42 di atas maka kinerja keuangan pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat belum berhasil untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja keuangan sebesar 95%. Realisasi fisik semua kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini pada umumnya sudah diatas 99,80%. Dalam rangka pencapaian IKU, Dinas Koperasi, UKM telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran sebagai berikut :

Tabel 45
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama
Presentase Peningkatan Nilai Asset Koperasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	Realisasi	Capaian	Sisa Anggaran (Rp)	
	Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM	Persentase peningkatan nilai asset koperasi (9,55%)	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING KOPERASI					
			Pelatihan SOM pengelolaan simpan pinjam pembiayaan syariah oleh koperasi bagi pengurus/pengelola	53,563,950	45,931,350	85.75	7,632,600	
			Peningkatan Permodalan Koperasi	59,167,800	57,772,400	97.64	1,395,400	
			Pelatihan Dewan Syariah Bagi KSPFS/USPPS Koperasi (DAK)	460,268,000	403,989,750	87.77	56,278,250	
			Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Koperasi Jasa Keuangan Bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola (DAK)	197,653,700	170,121,700	86.07	27,532,000	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI					
			Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	130,129,000	125,963,930	96.80	4,165,070	
			Pembinaan dan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	69,857,800	67,776,250	97.02	2,081,550	
			Reviu Penerapan dan Sanksi bagi Koperasi	182,952,000	178,047,980	97.32	4,904,020	
			Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi					
	Satuan Tugas Pengawas Koperasi	172,052,000	167,374,000	97.28	4,678,000			
	Jumlah			1,325,644,250	1,216,977,360	91,80	108,666,890	

Pada tabel 45 diatas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian target indicator kinerja utama presentase peningkatan nilai asset koperasi 9,55 % didapat melalui capaian realisasi keuangan sebesar 91,80% dengan efisiensi anggaran sebesar 8,20%.

Tabel 46
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama
Presentase Peningkatan Nila Omset Koperasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	Realisasi	Capaian	Sisa Anggaran (Rp)
	Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM	Persentase peningkatan nilai omset koperasi (8,55%)	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING KOPERASI				
			Pelatihan SOM pengelolaan simpan pinjam pembiayaan syariah oleh koperasi bagi pengurus/pengelola	53,563,950	45,931,350	85.75	7,632,600
			Peningkatan usaha KSP/USP Koperasi	94,511,000	86,436,000	91.46	8,075,000
			Peningkatan kapasitas usaha koperasi sektor pertanian dan perkebunan	85,097,100	78,473,709	92.22	6,623,391
			Peningkatan kapasitas usaha koperasi sektor peternakan dan perikanan	91,532,300	85,139,700	93.02	6,392,600
			Pembinaan Usaha Sektor Riil koperasi menuju kemitraan usaha	115,257,650	110,564,450	95.93	4,693,200
			Pembinaan Usaha Koperasi Melalui Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)	242,645,200	238,859,800	98.44	3,785,400
			Peningkatan Usaha Koperasi yang Mengelola Produk Unggulan daerah dengan Pendekatan OVP	112,660,800	105,499,071	93.64	7,161,729
			Peningkatan Peran Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pola Syariah	223,732,650	202,053,852	90.31	21,678,798
			Jumlah			1,019,000,650	952,957,932

Pada tabel 46 diatas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian target indicator kinerja utama presentase peningkatan nilai omset koperasi 8,55 % didapat melalui capaian realisasi keuangan sebesar 93,52% dengan efisiensi anggaran sebesar 6,48%.

Tabel 47
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama
Presentase Koperasi Aktif

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	Realisasi	Capaian	Sisa Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM	Persentase koperasi aktif (78,03%)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI				
			Pengembangan dan Peningkatan Data dan Informasi	68,894,500	63,084,200	91.57	5,810,300
			Pembinaan Kelembagaan Koperasi	312,029,600	286,226,400	91.73	25,803,200
			Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award	128,962,250	128,386,410	99.55	575,840
			Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	52,951,500	52,211,000	98.60	740,500
			Pembenahan Koperasi Tidak Aktif	55,044,700	53,385,600	96.99	1,659,100
			Sosialisasi dan Peningkatan Peran Koperasi dalam Pengembangan kelompok usaha Strategis	176,034,620	169,852,900	96.49	6,181,720
			Familiarization Trip berbasis koperasi	36,561,950	31,629,810	86.51	4,932,140
			Penyusunan Ranperda Pembangunan dan Pengembangan Koperasi dan UKM	207,007,100	204,322,300	98.70	2,684,800
			Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi bagi pejabat pengawas koperasi	71,834,000	69,243,250	96.39	2,590,750
			Peningkatan pelayanan Mess UFTD	400,160,184	397,498,740	99.33	2,661,444
			Sosialisasi Perkoperasian Dilokasi TMMD/II	32,190,000	31,548,500	98.01	641,500
			Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi	111,073,500	108,497,800	97.68	2,575,700
			Pelatihan Penyusunan Bisnis Plan Bagi Koperasi (DAK)	184,467,100	172,271,950	93.39	12,195,150
			Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi Bagi Pengurus Koperasi (DAK)	151,624,800	144,249,800	95.14	7,375,000
			Pelatihan Akuntansi Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi (DAK)	203,443,400	186,308,400	91.58	17,135,000
			Pelatihan Tata Cara Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Bagi Pengurus /Pengelola Koperasi (DAK)	150,674,000	141,504,000	93.91	9,170,000
			Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi Bagi Pengurus Koperasi di Daerah Tertinggal (DAK)	205,468,400	180,561,800	87.88	24,906,600
			Pelatihan Penguatan Pengawasan Bagi Pengurus/Pengawas Koperasi (DAK)	174,095,000	118,786,600	68.23	55,308,400
						Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	
			Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan	826,120,000	804,915,000	97.43	21,205,000
Jumlah				3,548,636,604	3,344,484,460	94,25	204,152,144

Pada tabel 47 diatas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian target indicator kinerja utama presentase koperasi aktif 78,03 % didapat melalui capaian realisasi keuangan sebesar 94,25% dengan efisiensi anggaran sebesar 5,75%.

Tabel 48
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	Realisasi	Capaian	Sisa Anggaran (Rp)
	Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi akuntabilitas kinerja (realisasi B)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKAHITORAN	2,213,185,515	2,100,914,218	94.93	112,271,297
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14,400,000	13,480,557	93.61	919,443
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	560,046,950	496,936,059	88.73	63,110,891
			Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	868,858,870	863,190,878	99.35	5,667,992
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	30,547,345	30,529,100	99.94	18,245
			Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	28,762,200	28,648,400	99.60	113,800
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,501,350	20,404,000	99.53	97,350
			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	16,440,000	15,240,000	92.70	1,200,000
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	485,293,800	466,465,724	96.12	18,828,076
			Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	151,035,000	137,987,000	91.36	13,048,000
			Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	6,100,000	3,800,000	62.30	2,300,000
			Penyediaan Makanan dan Minuman	31,200,000	24,232,500	77.67	6,967,500
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2,055,619,090	1,949,417,063	94.83	64,202,027
			Pengadaan Mebeleur	200,000,000	158,460,000	79.23	41,540,000
			Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	42,000,000	41,522,800	98.86	477,200
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	460,000,000	457,355,000	99.43	2,645,000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	205,169,090	192,576,263	93.86	12,592,827
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	20,450,000	16,826,000	82.28	3,624,000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	10,000,000	9,750,000	97.50	250,000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	10,000,000	9,943,000	99.43	57,000
			Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	196,000,000	192,984,000	98.46	3,016,000
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	912,000,000	870,000,000	95.39	
			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	53,250,000	52,895,000	99.33	355,000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	53,250,000	52,895,000	99.33	355,000
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	43,216,000	38,233,400	88.47	4,982,600
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43,216,000	38,233,400	88.47	4,982,600
			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBAANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	524,935,700	499,378,550	95.13	11,331,900
	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	111,441,200	100,642,300	90.31	10,798,900		
	Penatausahaan Keuangan SKPD	218,524,000	217,991,000	99.76	533,000		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	79,531,500	73,306,400	92.17	6,225,100		
	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	115,439,000	107,438,850	93.07	8,000,150		
	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	1,018,602,000	959,470,812	94.19	59,131,188		
	Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah	1,018,602,000	959,470,812	94.19	59,131,188		
	Jumlah			5,908,808,305	5,600,309,043	94.78	252,274,012

Pada tabel 48 diatas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian target indicator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja B didapat melalui capaian realisasi keuangan sebesar 94,78% dengan efisiensi anggaran sebesar 5,22%.

Realisasi semua kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini pada umumnya sudah diatas 90%. Adapun kegiatan yang mempunyai kinerja keuangan kurang dari 90% adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp. 560.046.950,- (Lima ratus enam puluh juta empat puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 496.936.059,- (Empat ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima puluh Sembilan rupiah) atau (88,73%) dengan fisik (100%). Sisa anggaran sebesar Rp. 63.110.891,- (Enam puluh tiga juta seratus sepuluh ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) merupakan efisiensi dari belanja faximile/kawat/internet
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur dengan dana sebesar Rp. 6.100.000,- (Enam juta seratus ribu rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau (62,30%) dengan fisik (85%). Sisa anggaran sebesar Rp. 2.300.000,- dikarenakan adanya kegiatan ceramah agama dan senam pagi yang tidak terealisasi seluruhnya karena adanya kegiatan rutin di Masjid Raya dan Kantor Gubernur.
3. Kegiatan Penyediaan Makan Minum dengan dana sebesar Rp. 31.200.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 24.232.500,- (Dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau (77,67%) dengan fisik (100%). Sisa anggaran Rp. 6.967.000,-
4. Kegiatan Pengadaan Mobiler dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 158.460.000,- (Seratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) atau (87,18%) dengan fisik (100%). Sisa anggaran cukup besar sebesar Rp. 53.342.600,- karena pengadaan kursi tamu dan

lemari arsip tidak jadi dilaksanakan sebab tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor dengan dana sebesar Rp. 20.450.000,- (Duan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 16.826.000,- (Enam belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau (82,28%) dengan fisik (100%). Sisa anggaran sebesar Rp. 3.624.000,- karena efesiensi pemeliharaan dan perlengkapan kantor
6. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan dana sebesar Rp. 43,216.000,- (Empat puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 38.233.400,- (Tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau (88.47%) dengan fisik (100%). Sisa anggaran sebesar Rp. 4.982.600,- yang berasal dari Belanja perjalanan dinas luar daerah.
7. Kegiatan Familiarization Trip Berbasis Koperasi dengan dana sebesar Rp. 36.561.950,- (Tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 31.629.810,- (Tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau (86,51%) dengan fisik (100%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 11.063.269,- diantaranya sisa dari Belanja BBM dan Belanja perjalanan dinas dalam daerah.
8. Kegiatan Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi Bagi Pengurus Koperasi di Daerah Tertinggal (DAK) dengan dana sebesar Rp. 205.468.400,- (Dua ratus lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat raus rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 180.561.800,- (seratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) atau (87,88%) dengan fisik (100%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 24.906.600,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus enam ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari

sisa Belanja akomodasi, Belanja perjalanan dinas luar daerah, Belanja jasa honorarium tenaga ahli/ instruktur/ narasumber.

9. Kegiatan Pelatihan Penguatan Pengawasan Bagi Pengurus/Pengawas Koperasi (DAK) dengan dana sebesar Rp. 174.095.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 118.786.600,- (Seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) atau (68,23%) dengan fisik (100%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 55.308.400,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) yang merupakan kelebihan penganggaran biaya transportasi peserta.
10. Kegiatan Pelatihan SOM pengelolaan simpan pinjam pembiayaan syariah oleh koperasi bagi pengurus/pengelola dengan dana sebesar Rp. 53.563.950,- (Lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 45.931.350,- (Empat puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau (85,75%) dengan fisik (100%). Sisa anggaran sebesar Rp. 7.632.600,- (Tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang berasal dari kelebihan penganggaran Belanja transportasi.
11. Kegiatan Pelatihan Dewan Syariah Bagi KSPPS/USPPS Koperasi (DAK) dengan dana sebesar Rp. 460.268.000,- (Empat ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 403.989.750,- (Empat ratus tiga juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau (87,77%) dengan fisik (100%). Sisa anggaran sebesar Rp. 56.278.250,- (Lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) merupakan kelebihan penganggaran biaya makan minum, transportasi, perjalanan dinas dan honorarium narasumber.
12. Kegiatan Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Koperasi Jasa Keuangan Bagi Pengurus /Pengawas/Pengelola (DAK) dengan dana sebesar Rp.

197.653.700,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 170.121.700,- (Seratus tujuh puluh juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) atau (86,07%) dengan fisik (100%). Sisa anggaran sebesar Rp. 27.532.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang merupakan kelebihan penganggaran biaya transportasi peserta.

13. Kegiatan Pengembangan UMKM Kerajinan Sumatera Barat dengan dana sebesar Rp. 1.062.582.700,- (Satu milyar enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 917.679.876,- (Sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau (86,36%) dengan fisik (100%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 144.902.824,- (Seratus empat puluh empat juta Sembilan ratus dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), diantaranya berasal dari honorarium narasumber, belanja dekorasi, Belanja perjalanan dinas dalam daerah, Belanja perjalanan dinas luar daerah, Belanja perjalanan dinas luar negeri.
14. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Usaha Bagi UKM di Kawasan Wisata (DAK) dengan dana sebesar Rp. 381.848.100,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh delapan seratus rupiah), dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 338.233.100,- (Tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) atau (88,58%) dengan fisik (100%). Terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp. 43.615.000,- (Empat puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah) yang berasal dari efisiensi dan kelebihan dalam penganggaran bahan praktek dan perjalanan dinas.
15. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Dalam Pengembangan Produk Unggul Bagi UMKM (DAK) dengan dana sebesar Rp. 130.282.700,- (Seratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 96.182.700,- (Sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus

rupiah) atau (73,83%) dengan fisik (100%). Terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp. 34.100.000,- (Tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang berasal dari kelebihan penganggaran bahan praktek dan belanja transportasi

16. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Usaha dan Inovasi Pangan Berbasis Umbi-Umbian dan Sagu (DAK) dengan dana sebesar Rp. 330958300,- (Seratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 286707800,- (Sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) atau (86,63%) dengan fisik (100%). Terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp. 44,250.500,- (Empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) efisiensi belanja akomodasi dan perjalanan dinas.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Koperasi, UKM Propinsi Sumatera Barat kepada pihak-pihak terkait atas capaian kinerja tahun 2018. Capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis pada tahun 2018 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM :

1. Persentase peningkatan nilai asset koperasi dengan target sebesar 9,5% terealisasi sampai tahun ini sebesar 9,55% dengan capaian sebesar 100,53% **(sangat baik)**
2. Persentase peningkatan nilai omset koperasi dengan target sebesar 8,5% terealisasi sampai tahun ini sebesar 8,55% dengan capaian sebesar 100,59% **(sangat baik)**
3. Persentase koperasi aktif dengan target sebesar 78% terealisasi sampai tahun ini sebesar 78,03% dengan capaian sebesar 100,04% **(sangat baik)**
4. Jumlah produk UKM yang terstandarisasi dengan target sebesar 40 buah terealisasi sampai tahun ini sebesar 45 buah dengan capaian sebesar 112,5% **(sangat baik)**

Sasaran 2. Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi dengan indikator:

1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dengan target kategori BB terealisasi B dengan capaian sebesar 95,36% **(sangat baik)**

4.2. SARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis tahun 2019 sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian hampir seluruh sasaran strategis dengan capaian sangat baik atau pencapaiannya diatas

100%, hanya indicator indicator meningkatnya tata kelola organisasi yang capaiannya dibawah 100%.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2019, maka untuk kedepannya, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi akan mengevaluasi kembali target kinerja yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kondisi data terakhir dan terus melakukan optimalisasi dalam meningkatkan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Sumatera Barat. Selain itu, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat akan terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi, baik internal maupun eksternal dengan instansi terkait lainnya dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan serta monitoring evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan, terutama selama tahun 2019.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Koperasidan UMKM Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik. Selanjutnya, diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta mengoptimalkan pencapaian Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat di masa yang akan datang.